RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH
KAB. PADANG PARIAMAN

2025

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DAERAH
Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584
Telp. (0751) 4784555 Faximile (0751) Email Setda@padangpariamankab.go.id
Website www.padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 05 /KEP/SETDA/2024

TENTANG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
9. Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 002/KEP/SETDA-2021 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

KEDUA : Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebagimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

KETIGA : Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :

a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Rencana Kerja Dinas Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas ini, Anggaran Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Ditetapkan di : Parit Malintang
Pada Tanggal : 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM.C.R.B.C
Pembina Utama Madya
NIP. 19790402 199803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Sekretariat Daerah yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Sekretariat Daerah Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Parit Malintang, 10 juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM.C.R.B.C
Pembina Utama Madya
NIP. 19790402 199803 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN …….. 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 7

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ….. 13

2.1 Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 31

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 84

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja 87

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 112

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....……. 117

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 117

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 122

3.3 Program dan Kegiatan 127

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..174

BAB V. PENUTUP ……267

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Tabel 2.1 (T.C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra	25
2.	Tabel 2.2 (T.C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	39
3.	Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2025	93
4.	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	125
5.	Tabel 3.3 (T.C 33) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	127
6.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	174

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-based management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program

yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai

aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

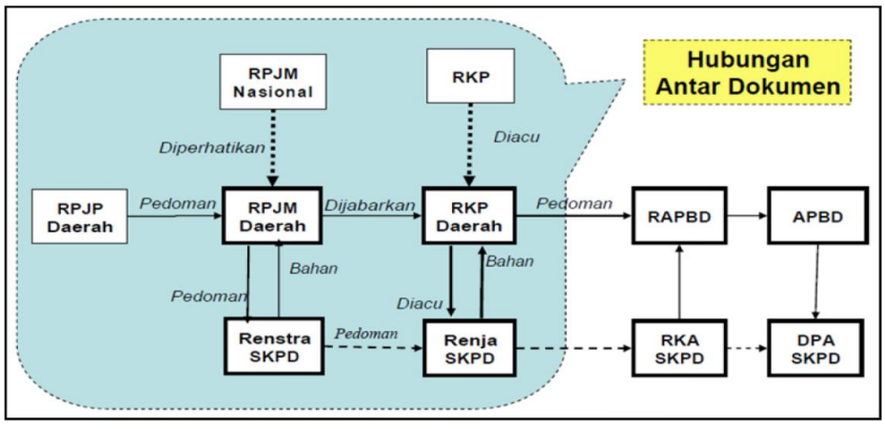

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Sekretariat Daerah merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Sekretariat Daerah merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Sekretariat Daerah dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Sekretariat Daerah dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja ini memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Sekretariat Daerah akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Sekretariat Dearah untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Sekretariat Dearah diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Sekretariat Daerah untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai

contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesejahteraan rakyat, maka Renja Sekretariat Daerah akan mencakup program seperti Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat , Program perekonomian dan pembangunan, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang target indikatornya menunjang pencapaian prioritas RKPD. Dengan demikian, Sekretariat Daerah dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Sekretariat Daerah juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Sekretariat Daerah didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renstra tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomro 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4700);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8) Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

12) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

16) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah tahun 2024 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Adapun tujuannya adalah :

1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
3) Menyelaraskan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(Rp)	(Rp)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN		**A**	**BB**	**nilai**	**36.948.563.542**	**34.161.652.372**	**92,46%**

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA		**100**	**100**	**%**			
		BB	**B**	**nilai**			
		100	**100**	**%**			
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		**100**	**100**	**%**	**1.392.757.000**	**1.358.680.398**	**97,55%**
		90	**90**	**%**			
1	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	70 Paket	65 Paket	tahun	54.000.000,00	43.578.600,00	80,70
3	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	1	0	kec, nagari, kelompok sadar hukum dan sekolah	-	-	-
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		**100**	**100**	**%**	**2.588.522.185**	**2.174.340.266**	**84,00%**
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	0	tahun	25.050.000,00	-	-
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**100**	**100**	**%**	**2.549.700.260**	**2.400.026.075**	**94,13%**
2	Pengadaan Mebel	2	3	paket	416.070.000,00	354.028.950,00	85,09
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**100**	**100**	**%**	**869.187.500**	**721.873.865**	**83,05%**
2	Pemeliharaan Mebel	10	0	mabel	10.000.000,00	-	0,00
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		**100**	**0**	**%**	**810.355.566**	**763.959.514**	**94,27%**
		100	**100**	**%**			
2	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	0	paket	30.000.000,00	-	0,00
FASILITASI KERUMAHTANGAAN SEKRETARIAT DAERAH		**60%**	**58%**	**%**	**325.033.230**	**280.326.445**	**86,25%**
		83,45	**85,12**	**nilai**			
		50%	**27%**	**%**			
		12	**10,81**	**nilai**			

4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	0	dokumen	19.314.400,00	12.505.050,00	64,74
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		**97%**	**100%**	**%**	**324.993.750**	**299.448.093**	**92,14%**
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	170	48	paket	199.923.800,00	194.478.305,00	97,28
PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM		**100**	**100**	**%**	**30.002.900**	**27.647.000**	**92,15%**
3	Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	0	dokumen	10.002.900,00	9.500.000,00	94,97

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(Rp)	(Rp)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA		**A**	**BB**	**nilai**	**36.948.563.542**	**34.161.652.372**	**92,46%**
		100	**100**	**%**			
		BB	**B**	**nilai**			
		100	**100**	**%**			
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		**100**	**100**	**%**	**112.415.742**	**37.237.000**	**33,12%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	dokumen	44.375.000,00	8.547.000,00	19,26
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1	1	dokumen	15.000.000,00	5.875.500,00	39,17
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	1	dokumen	7.000.092,00	565.500,00	8,08

4	Koodinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	1	1	dokumen	8.697.400,00	7.011.000,00	80,61
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	1	1	dokumen	8.599.750,00	2.882.500,00	33,52
6	Koordinasi dan Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	dokumen	28.743.500,00	12.355.500,00	42,99
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		**100**	**100**	**%**	**21.905.585.099**	**20.293.723.877**	**92,64%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	1	tahun	21.495.986.499,00	19.910.186.977,00	92,62
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	tahun	385.560.000,00	368.710.000,00	95,63
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	tahun	25.144.200,00	24.074.640,00	95,75
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1	1	dokumen	26.199.800,00	25.672.578,00	97,99
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		**100**	**100**	**%**	**1.392.757.000**	**1.358.680.398**	**97,55%**
		90	**90**	**%**			
2	Koordinasi dan Pelaklsanaan Sisterm Informasi Kepegawaian	1	1	tahun	107.777.250,00	107.641.570,00	99,87
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		**100**	**100**	**%**	**2.588.522.185**	**2.174.340.266**	**84,00%**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	tahun	76.040.000,00	52.737.110,00	69,35
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	tahun	490.937.185,00	384.103.925,00	78,24

3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	3	paket	259.648.000,00	227.709.095,00	87,70
5	Penyediaan bahan /Material	1	1	tahun	134.975.000,00	102.211.500,00	75,73
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	tahun	729.761.000,00	677.375.395,00	92,82
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	tahun	872.111.000,00	730.203.241,00	83,73
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**100**	**100**	**%**	**2.549.700.260**	**2.400.026.075**	**94,13%**
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	4	4	unit	1.995.700.000,00	1.994.458.125,00	99,94
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	2	paket	87.950.000,00	47.099.000,00	53,55
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	tahun	49.980.260,00	4.440.000,00	8,88
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**100**	**100**	**%**	**4.036.284.360**	**3.834.212.234**	**94,99%**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	tahun	120.233.360,00	115.534.340,00	**96,09**
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	tahun	800.050.000,00	738.967.874,00	**92,37**
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	tahun	286.395.000,00	234.870.020,00	**82,01**
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**100**	**100**	**%**	**869.187.500**	**721.873.865**	**83,05%**

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Opemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35	35	kendaraan	529.997.500,00	488.832.283,00	92,23
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	tahun	59.800.000,00	35.160.550,00	58,80
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	1	1	gedung	269.390.000,00	197.881.032,00	73,46
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		**100**	**0**	**%**	**810.355.566**	**763.959.514**	**94,27%**
		100	**100**	**%**			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	1	tahun	745.355.566,00	730.409.514,00	97,99
3	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	1	paket	35.000.000,00	33.550.000,00	95,86
FASILITASI KERUMAHTANGAAN SEKRETARIAT DAERAH		**100**	**100**	**%**	**1.768.240.600**	**1.721.152.065**	**97,34%**
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12	12	bulan	1.123.503.300,00	1.097.199.754,00	97,66
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12	12	bulan	644.737.300,00	623.952.311,00	96,78
FASILITASI KERUMAHTANGAAN SEKRETARIAT DAERAH		**60%**	**58%**	**%**	**325.033.230**	**280.326.445**	**86,25%**
		83,45	**85,12**	**nilai**			
		50%	**27%**	**%**			
		12	**10,81**	**nilai**			

1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	4	dokumen	60.000.030,00	42.778.406,00	71,30
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	26	15	Inovasi, OPD, UKPP, dokumen	135.718.800,00	124.090.174,00	91,43
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44	44	OPD dan Kecamatan	70.500.500,00	63.339.197,00	89,84
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	dokumen	39.499.500,00	37.613.618,00	95,23
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		**85**	**85**	**%**	**590.482.000**	**576.120.633**	**97,57%**
		85	**85**	**%**			
1	Fasilitasi Keprotokolan	1	1	tahun	275.000.000,00	271.484.965,00	**98,72**
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	1	tahun	195.682.000,00	185.415.468,00	**94,75**
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	1	tahun	119.800.000,00	119.220.200,00	**99,52**
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		***100%***	**100%**	**%**	**6.140.346.020**	**6.021.265.958**	**98,06%**
		75%	**72%**	**%**			
		2,800 (tinggi)	**2,51**	**nilai**			
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	1	1	tahun	30.000.000,00	18.963.530,00	63,21
2	Pengelolaan Administrassi Kewilayahan	1	1	tahun	20.000.000,00	14.274.162,00	71,37
3	Fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah	1	1	tahun	112.673.500,00	100.462.229,00	89,16
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		***Peringkat 3***	**Peringkat 5**	**juara**	**5.567.221.000**	**5.506.620.469**	**98,91%**
		60%	**60%**	**%**			

		10%	**10%**	**nilai**			
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	1	1	tahun	5.555.000.000,00	5.495.075.469,00	98,92
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1	1	tahun	7.275.000,00	6.923.800,00	95,17
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1	1	tahun	4.946.000,00	4.621.200,00	93,43
FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		**90%**	**90%**	**%**	**380.451.520**	**359.704.190**	**94,55%**
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1	1	tahun	50.065.560,00	42.687.040,00	85,26
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	1	1	tahun	280.312.600,00	268.441.831,00	95,77
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1	1	tahun	50.073.360,00	48.575.319,00	97,01
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		***100%***	**50%**	**%**	**629.996.720**	**556.217.594**	**88,29%**
		100%	**100%**	**%**			
		12%	**26,58%**	**%**			
		100%	**100%**	**%**			
PELAKSANAAN KEBIAJAKAN PEREKONOMIAN		**90%**	**90%**	**%**	**120.000.070**	**98.456.266**	**82,05%**
1	Koordinasi, Singkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	2	dokumen	45.000.000,00	36.968.197,00	82,15
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	17	17	kecamatan	30.000.000,00	24.910.619,00	83,04
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		**100**	**100**	**%**	**155.000.000**	**130.666.235**	**84,30%**

1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3	3	kali	50.000.000,00	45.174.900,00	90,35
2	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1	1	tahun	55.000.000,00	44.568.412,00	81,03
3	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	27	27	OPD	50.000.000,00	40.922.923,00	81,85
PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM		**100**	**100**	**%**	**30.002.900**	**27.647.000**	**92,15%**
1	Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	6	6	OPD	10.000.000,00	8.997.500,00	89,98
2	Koordinasi, Singkroniosasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	6	6	OPD	10.000.000,00	9.149.500,00	91,50

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(Rp)	(Rp)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA		**A**	**BB**	**nilai**	**36.948.563.542**	**34.161.652.372**	**92,46%**
		100	**100**	**%**			
		BB	**B**	**nilai**			
		100	**100**	**%**			
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		**100**	**100**	**%**	**1.392.757.000**	**1.358.680.398**	**97,55%**
		90	**90**	**%**			
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	85	88	ASN	120.087.250,00	114.588.238,00	95,42

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**100**	**100**	**%**	**4.036.284.360**	**3.834.212.234**	**94,99%**
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	116	125	THL	2.829.606.000,00	2.744.840.000,00	**97,00**
FASILITASI KERJASAMA DAERAH		**85%**	**90%**	**%**	**30.000.000**	**21.241.378**	**70,80%**
1	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	6	13	kerjasama	30.000.000,00	21.241.378,00	70,80
PELAKSANAAN KEBIAJAKAN PEREKONOMIAN		**90%**	**90%**	**%**	**120.000.070**	**98.456.266**	**82,05%**
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	4	dokumen	45.000.070,00	36.577.450,00	81,28
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		**97%**	**100%**	**%**	**324.993.750**	**299.448.093**	**92,14%**
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	180	497	paket	65.070.000,00	57.380.000,00	88,18
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	63	peserta	59.999.950,00	47.589.788,00	79,32

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. Tidakadanya ketersediaan anggaran, di haruskan kegiatan tersebut tidak laksanakan seperti pada sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemeliharaan Mebel,
b. Dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang indikator nya belum sesuai dengan yang di jalankan sehingga tidak optimalnya capaian target yang di jalankan oleh bidang tersebut.
c. adanya kegiatan yang tidak optimal capaian targetnya dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga target yang ditetapkan di awal tahun tidak tercapai.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

a. Adanya ketetapan baru untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan yang berimbas pada anggaran kegiatan-kegiatan di Sekretariat Daerah.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025:

a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Sekretariat Daerah tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2025 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Sekretariat Daerah mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun

2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.

d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2025. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2025.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas

mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2025. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
s/d 2024

kode (Kepmendagri 050-3708)					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
									Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					SEKRETARIAT DAERAH									
4	**01**	**01**			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA***	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat***	***A***	***BB***	***A***	***BB***	**80%**	***A***	***BB***	***BB***
	-	-	-	-		***Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	***100%***	***100%***	***100%***
	-	-	-	-		***Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB***	***BB***	***B***	***BB***	***B***	**80%**	***BB***	***B***	***B***

	-	-	-	-		***Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	***100%***	***100%***	***100%***
4	**01**	**01**	**2.01**		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4	**01**	**01**	**2.02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4	**01**	**01**	**2.05**		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
						Persentase Terpenuhinya Peningkatan Pemahaman Hukum Perangkat Daerah	**95%**	**90%**	**90%**	**90%**	**100%**	**90%**	**90%**	**90%**
4	**01**	**01**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4	**01**	**01**	**2.07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4	**01**	**01**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

4	**01**	**01**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4	**01**	**01**	**2.11**		**ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	**Persentase Terpenuhinya medical Check Up KDH/WKDH**	**100%**	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**
						Persentase Terpenuhinya Pakaian Dinas KDH/WKDH	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**
4	**01**	**01**	**2.12**		**FASILITASI KERUMAHTANGAAN SEKRETARIAT DAERAH**	**Persentase Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4	**01**	**01**	**2.13**		**PENATAUSAHAAN ORGANISASI**	**Persentase OPD yang tepat tugas dan fungsinya**	**80%**	**58%**	**60%**	**58%**	**97%**	**60%**	**58%**	**58%**
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	**84,75**	**85,12**	**83,45**	**85,12**	**102%**	**83,45**	**85,12**	**85,12**
						Persentase perangkat daerah dengan nilai sakip A ke atas	**60%**	**27%**	**50%**	**27%**	**54%**	**50%**	**27%**	**27%**
						Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP hasil evaluasi Kemenpan	**12,5**	**10,81**	**12**	**10,81**	**90%**	**12**	**10,81**	**10,81**
4	**1**	**01**	**2.14**		**PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	**Persentase kegiatan KDH/WKDH yang sesuai standar keprotokoleran**	**95%**	**85%**	**85%**	**85%**	**100%**	**85%**	**85%**	**85%**

						Persentase kegiatan KDH/WKDH yang terdokumentasi dengan baik	**95%**	**85%**	**85%**	**85%**	**100%**	**85%**	**85%**	**85%**
4	**01**	**02**			***PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT***	***Persentase terfasilitasinya kebjakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	***100%***	***100%***	***100%***
	-	-	-	-		***Persentase Rancangan ProdukHukum Daerah Yang Menjadi ProdukHukum Daerah***	***80%***	***72%***	***75%***	***72%***	**96%**	***75%***	***72%***	***72%***
	-	-	-	-		***Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri***	***3,000 (sangat tinggi)***	***2,51***	***2,800 (tinggi)***	***2,51***	**90%**	***2,800 (tinggi)***	***2,51***	***2,51***
4	**01**	**02**	**2.01**		**ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN**	**Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indikator Kinerja tinggi**	**50%**	**35%**	**30%**	**35%**	**117%**	**30%**	**35%**	**35%**
4	**01**	**02**	**2.02**		**PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi**	**Peringkat 3**	**Peringkat 5**	**Peringkat 3**	**Peringkat 5**	**60%**	**Peringkat 3**	**Peringkat 5**	**Peringkat 5**

						Persentase akumulasi mesjid yg dikunjungi tim safari ramadhan Pemda Kab.Padang Pariaman	**80%**	**60%**	**60%**	**60%**	**100%**	**60%**	**60%**	**60%**
						Persentase peningkatan hafiz dan hafizah di Kab. Padang Pariaman	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**100%**	**10%**	**10%**	**10%**
4	**01**	**02**	**2.03**		**FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Persentase terlaksananya fasilitasi dan bantuan hukum, serta penyelesaian kasus**	**95%**	**90%**	**90%**	**90%**	**100%**	**90%**	**90%**	**90%**
4	**01**	**02**	**2.04**		**FASILITASI KERJASAMA DAERAH**	**Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi**	**95%**	**90%**	**85%**	**90%**	**106%**	**85%**	**90%**	**90%**
4	**01**	**03**			***PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN***	***Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman***	***100%***	**50%**	***100%***	**50%**	**50%**	***100%***	**50%**	**50%**
	-	-	-	-		***Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	***100%***	***100%***	***100%***
	-	-	-	-		***Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD***	***14%***	***26,58%***	***12%***	***26,58%***	**221%**	***12%***	***26,58%***	***26,58%***
	-	-	-	-		***Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	**100%**	***100%***	***100%***	***100%***

4	**01**	**03**	**2.01**		**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN**	**Persentase terlaksananya pengawasan pelaksanaa kebijakan perekonomian**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4	**01**	**03**	**2.02**		**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Persentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten padang pariaman**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4	**01**	**03**	**2.03**		**PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Persentase tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa**	**99%**	**100%**	**97%**	**100%**	**103%**	**97%**	**100%**	**100%**
4	**01**	**03**	**2.04**		**PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM**	**Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perengkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 tahun 2022 tentang SOTK, Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas sebagai pengampu dari berbagai perangkat daerah ataupun bagi Sekretariat Daerahnya sendiri.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a). Tujuan : Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

b). Sasaran :
1. Meningkatnya Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penataan Organisasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

c). Indikator Kinerja :
1. Penyusunan LKJiP Pemerintah Daerah Tepat Waktu,
2. Persentase SKM Perangkat Daerah bernilai baik
3. Persentase Bahan Kebijakan yang ditetapkan menjadi Kebijakan Bidang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penataan Organisasi dan Pelayanan Publik

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagai sebuah OPD ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrastif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah Mempunyai Fungsi:

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrastif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif pada instansi daerah;
e. pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan/ atau
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretaris Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan Sekretaris Daerah membawahi.

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 bagian yaitu:

1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah serta fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjsama luar negeri dan evaluasi kerjasama.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama membawahkan 3 (tiga) subbagian yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Administrasi Pemerintahan dan kerjasama
2. Subbagian Administrasi Kewilayahan
3. Subbagian Otonomi Daerah

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan 3 (tiga) subbagian yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Bina Mental Spiritual.
2. Subbagian Kesejahteraan Sosial.
3. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Kepala Bagian Hukum membawahkan 3 (tiga) subbagian yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Perundang-Undangan
2. Subbagian Bantuan Hukum.
3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 bagian yaitu:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sumber daya alam pertanian, perikanan, air dan lingkungan hidup. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahkan 3 (tiga) subbagian yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD
2. Subbagian Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan SDA
3. Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan 3 (tiga) subbagian yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Penyusunan Program
2. Subbagian Pengendalian Program
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten sekretaris daerah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahkan 3 (tiga) subbagian yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan. Assiten administrasi umum membawahi 4 (empat) bagian yakni sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Kepala Bagian Umum membawahkan 3 (tiga) subbagian yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian
2. Subbagian Perlengkapan
3. Subbagian Rumah Tangga

2. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten sekretaris daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi. Kepala Bagian Organisasi membawahkan 3 (tiga) subbagian yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana

3. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

3. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan membawahkan 2 (dua) subbagian yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Protokol
2. Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahkan 2 (dua) subbagian yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Subbagian Keuangan

d. Staf Ahli

Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf ahli yang dimaksud yakni:

1. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian dan saran, masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang pemerintahan, hukum dan politik.
2. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian dan saran, masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.
3. Staf Ahli bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian dan saran, masukan serta pertimbangan kepada Bupati di bidang sosial,

budaya dan sumber daya manusia

e. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan tertentu.Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Saat ini terdapat jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa muda yang terdiri atas 4 ASN. Jabatan **fungsional pengelola pengadaan barang/jasa** yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional PPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

No	Golongan	Jumlah
1	IV	18
2	III	39
3	II	6
4	I	0
	Jumlah	**63**

Sumber : Bagian Umum Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Sekretariat Daerah Tahun 2025

komposisi pejabat esselonering di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN ESSELONERING

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pascasarjana (S.II)	22

2	Sarjana (S.I)	31
3	Diploma	0
4	SMA/SMK	10
5	SMP	0
	JUMLAH	**63**

Sumber : Bagian Umum Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Sekretariat Daerah Tahun 2025

Isu – Isu penting yang masih dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja adalah :

1) Belum memadainya kompetensi sumber daya perencanaan.
2) Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja organisasi.
3) Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.
4) Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi.
5) Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Seketariat.

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Sekretariat masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, serta menjalankan dan memanfaatkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemerhati pembangunan daerah, di antaranya adalah :

1) Pemanfaatan kapasitas SDM yang ada dengan memaksimalkan fungsi manajerial pimpinan dan penerapan standar operasional prosedur kerja yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

2) Senantiasa mereview pelaksanaan perencanaan pembangunan dan meningkatkan akurasi data serta memperhatikan masukan dari seluruh pemerhati pembangunan daerah.

3) Memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan data secara sistematis, akurat dan cepat dalam suatu sistem informasi.

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	28%	100 %	100 %	100 %	43,54%	-			IKU
2	PDRB/Income Per Kapita ADHB	Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	49,46	100 %	100 %	100 %	55,54	-	118 %	119 %	IKU
3	Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	B	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	69,19 (B)	-	5 lembaga	5lembaga	IKU
4	Persentase Penggunaan EProcurement terhadap Belanja Pengadaan	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	12 %	60 (cukup)	60 (cukup)	60 (cukup)	12%	-	56,40	56,40	IKU
5	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	2.800 (tinggi)	100%	100%	100%	3,1529 (sedang)	-	98,70 %	98,70 %	IKU
6	Indeks Pelayanan Publik	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti.	4,57	13%	14%	15%	3,88	-	13 %	13 %	IKU
7		Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik		100%	100%	100%		-	94 %	94 %	IKU
8		Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%		-	100 %	100 %	IKU

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Sekretariat Daerah Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Perangkat Daerah telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya dukungan dan fasilitasi lembaga keagamaan	1.	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	orang	1.300	1.171	90%	Hafiz/Hafizah
2.	Meningkatkan pengawasan/monitoring dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	1.	Persentase BUMD dengan kondisi baik	%	100%	50%	50%	-
3.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	1.	Nilai Sakip Setda yang dievaluasi Inspektorat Kab Padang Pariaman	nilai	A	BB	90%	-
4.	Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.	Persentase penyampaian laporan LPPD OPD tepat waktu	%	90%	100%	112%	-

5.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang indeks kepuasan masyarakat yang bernilai baik	%	85%	100%	118%	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
   1) Persentase penyampaian laporan LPPD OPD tepat waktu yang realisasi nya mencapai 112 %
   2) Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang indeks kepuasan masyarakat yang bernilai baik yang realisasinya juga mencapai 118 %

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
   1) Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa yang target nya 1.300 dan realisasinya masih mencapai 1.171 hafiz/hafizah
   2) Persentase BUMD dengan kondisi baik yang targetnya adalah 100% sedangkan capaian nya masih 50% di tahun 2023
   3) Nilai Sakip Setda yang dievaluasi Inspektorat Kab Padang Pariaman dengan target nilai A, realisasinya di tahun 2023 masih mendapat nilai BB dengan capaian target 90%.

I. Sasaran Strategis Meningkatnya dukungan dan fasilitas lembaga keagamaan

Tabel 2.4

Capaian Kinerja 1

No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**		**Satuan**	**Tahun 2023**			**Interprestasi**
					Target	**Realisasi**	**%**	
1.	Meningkatnya dukungan dan fasilitasi lembaga keagamaan	1.	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	orang	1.300	1.171	90%	Hafiz/Hafizah

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah

Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Serta Memelihara Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum". Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Lembaga pendidikan Al- Quran Yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah. Lembaga Pendidikan Alqur'an merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah serta lulus dalam seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebu Pafa) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius. Demi mendukung IKU Pemerintah Daerah yakni "Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah" dengan target di tahun 2023 sebesar 28%, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan IKU Sekretariat Daerah yakni "Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa", dimana Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan *leading sector* program ini dan dana kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Padang Pariaman dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman, donatur dan sumbangan lainnya. Tujuan Gebu Pafa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk melahirkan generasi Emas yang cinta AlQuran dan mengamalkan AlQuran dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menumbuhkan dan memacu semagat pelajar untuk menghafal dan mempelajari isi kandungan Alquran
3. Mendorong Generasi Muda berdasarkan nilai-nilai alquran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Memberikan Apresiasi kepada warga Padang Pariaman yang memiliki kemampuan pemahaman dan hafalan Alquran.
5. Melahirkan minimal 1.000 penghafal Alquran di kab Padang Pariaman

Dampak positif yang dihasilkan dari program ini adalah peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih agamis dan religius serta meningkatkan minat para penghafal Alquran di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan visi dan misi Religius Kabupaten Padang Pariaman.

Jumlah peserta yang mendaftar Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) tahun 2023 sebanyak 1.171 orang dari 17 Kecamatan, peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 1.171 orang dan yang mendapat bantuan bea siswa sebanyak 480 orang. Beasiswa ini diberi dasarkan kategori sebagai berikut:

- Kategori 1 Juz = Rp. 300.000
- Kategori 5 Juz = Rp. 750.000
- Kategori 10 Juz = Rp. 1.000.000
- Kategori 20 Juz = Rp. 2.000.000
- Kategori 30 Juz = Rp. 3.000.000

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini untuk tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023			
	Target	Realisasi	%	Kategori
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah	28%	43%	155%	"Sangat Berhasil"

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Dari Tabel 3.4 dapat di lihat, realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 yaitu sebesar 43% (253 Lembaga) sedangkan target yang ditetapkan adalah 28%, dengan capaian kinerja sebesar 155% (sangat berhasil). 253 dari 581 Lembaga Pendidikan Al- Qur'an telah menghasilkan hafizh/ hafizhah serta lulus dalam proses seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alqur'an yang diadakan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi Indikator Kinerja Utama ini yakni :

$$\text{Formulasi Pengukuran} : \frac{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan AlQur'an Yang Menghasilkan Hafizh dan Hafizhah}}{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan AlQur'an Keseluruhan}} \times 100\%$$

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah pada tahun 2022 dengan Tahun 2023 :

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase

Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah	%	27	27,02	100,07	28	43,54	155	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 16,54%.

Peningkatan tersebut dikarenakan adanya tambahan dana dari APBD Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2023 serta tambahan bantuan dana dari donatur lainnya.

Keberhasilan peningkatan kehidupan yang religius terutama Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah bukan hanya tanggung jawab Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Target dan realisasi dapat tercapai sepenuhnya, berkat tingginya minat putra-putri Padang Pariaman dalam menghafal Al-Qur'an yang di dukung semakin banyaknya Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman.

Pada Indikator ini untuk pencapaian target yang telah di tetapkan di atas, maka dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan :

- ✓ Pelaksanaan Kebijakan dan Kesejahteraan Rakyat

Sub Kegiatan:

✓ Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual

Seleksi Gabu Pafa Tahun 2023 di Mesjid Raya Padang Pariaman

c). Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah	%	26	27	28	10,32	27,02	43,54

Realisasi Indikator Kinerja "Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah pada tahun 2021 sebesar 10,32% dengan target RPJMD sebesar 26%. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 27,02 dengan target RPJMD sebesar 27%. Sedangkan pada tahun 2023 capaian kinerja mengalami peningkatan signifikan dengan realisasi sebesar 43,54% dari target RPJMD sebesar 28%.

d). Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2023 ini adalah

1. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan.
2. Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam rangka pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

e). Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya, biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100\ \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \text{ x } 100\ \%$$

Pada Tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 193.250.000,-sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 88.250.000,-. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 21%, dikarenakan APBD hanya menyediakan anggaran sebesar Rp. 88.250.000,- kemudian setelah dijalankan proposal kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) untuk beasiswa para Hafiz/Hafizah yang berasal dari 253 Lembaga Pendidikan Alquran maka didapatkan bantuan dari donatur sebesar Rp. 105.000.000,00 sehingga realisasi mencapai Rp. 193.250.000,00 dari target yang dianggarkan APBD yaitu sebesar Rp. 88.250.000,00.

Dibandingkan dengan tahun 2022 diperoleh efisiensi sebesar 33% (anggaran sebesar Rp 83.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 195.500.000,00), setelah dijalankan proposal Kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) untuk beasiswa para Hafiz/Hafizah yang berasal dari 157 Lembaga Pendidikan Alquran maka didapatkan bantuan dari donatur sebesar Rp. 111.900.000,00 sehingga realisasi mencapai Rp. 195.500.000,00 dari target yang dianggarkan APBD yaitu sebesar Rp.83.600.000,00.

Persentase efisiensi ini secara teori sudah sangat baik, sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

f). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk pembinaan lembaga pendidikan AlQur'an dan Tahfiz pada Bagian Kesra tidak ada penganggaran. Sementara Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dari *stake holder*, yaitu :

- Kegiatan ini dapat terlaksana karena dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya para Donatur seperti BAZNAS Padang Pariaman, Bank Nagari serta Tokoh Masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;
- Terjalinnya Kejasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Guru Mengaji/Guru Tahfizh yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;
- Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sangatlah tinggi.

Inovasi Kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) dilaunching pada tahun 2020 untuk memotivasi Lembaga Pendidikan Alqur'an yang ada di Kabupaten Padang Pariaman untuk menghasilkan Hafizh/Hafizhah dengan cara memberikan beasiswa/reward kepada para Hafizh/Hafizah.

Kemudian pada tahun 2021 dari 60 Lembaga Pendidikan Alquran menghasilkan 281 Hafiz/Hafizah yang lolos seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) dan mendapatkan beasiswa/reward dengan total anggaran yang diberikan sebesar Rp. 60.000.000,00.

Inovasi Kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) dilaunching pada tahun 2020 bertujuan untuk memotivasi Lembaga Pendidikan Alqur'an yang ada di Kabupaten Padang Pariaman agar menghasilkan Hafizh/Hafizhah dengan cara memberikan beasiswa/reward kepada para Hafizh/Hafizah dan pada tahun 2021 dari 60 Lembaga Pendidikan Alquran telah menghasilkan 281 Hafiz/Hafizah yang lolos seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) dan mendapatkan beasiswa/reward dengan total anggaran yang diberikan sebesar Rp. 60.000.000,00. Kemudian pada tahun 2022 dari 157 Lembaga Pendidikan Alquran menghasilkan 406 Hafiz/Hafizah yang lolos seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) dan mendapatkan beasiswa/reward dengan total anggaran yang diberikan sebesar Rp. 195.500.000,00.

Pada tahun 2023 dari 253 Lembaga Pendidikan Alquran menghasilkan 445 Hafiz/Hafizah yang lolos seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) dan mendapatkan beasiswa/reward dengan total anggaran yang diberikan sebesar Rp. 193.250.000,00.

Berikut data Lembaga Pendidikan Alquran yang menghasilkan Hafiz/Hafizah pada tahun 2023 :

Daftar Nama Lembaga Penghasil Hafizh/Hafizhah

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JUMLAH HAFIZH/HAFIZHAH
1	TPA Darul Makmur	Sintuk Toboh Gadang	1
2	TPA Miftahul Jannah	Sintuk Toboh Gadang	2
3	TPA Nurul Yaqin	Sintuk Toboh Gadang	1
4	TPA Raudhatul Islam	Sintuk Toboh Gadang	3
5	TPA Tajul Karomah	Sintuk Toboh Gadang	2
6	Yayasan Nabila	Sintuk Toboh Gadang	2
7	TPA Ainul Yaqin	Sintuk Toboh Gadang	4
8	TPA Baburrahman	Sintuk Toboh Gadang	1
9	TPA Baitul Hadi	Sintuk Toboh Gadang	5
10	Rumah Tahfzh Raudhatul Ilmi	Sintuk Toboh Gadang	1
11	Raudhatul Ilmi	Sintuk Toboh Gadang	1
12	Rimbo Aka Padang Toboh	Sintuk Toboh Gadang	2
13	Nurul Yaqin Yaraka	Sintuk Toboh Gadang	1
14	MDTA Raudhatul Ilmi	Sintuk Toboh Gadang	1
15	MDTA Jadid Attalaqi	Sintuk Toboh Gadang	1
16	TPQ Surau Kandih	Batang Gasan	5
17	TPQ Kularai	Batang Gasan	7
18	MDTA Aulia Mukminin	V Koto Timur	1
19	Pondok Tahfizh Al-Falah	V Koto Timur	1
20	TPA Birrul Walidain	V Koto Timur	1
21	MAS Kepala Hilalang	2x11 Kayu Tanam	1

22	Pes Nurul Yaqin Imam Ghazali	2x11 Kayu Tanam	2
23	Pesantren al-Hidayah	2x11 Kayu Tanam	1
24	Pondok Tahfizh Harun Arrasyid	2 x 11 Kayu Tanam	1
25	Pondok Tahfizh Hazima	2 x 11 Kayu Tanam	1
26	Rumah Tahfizh Shahibul Qur'an	2x11 Kayu Tanam	2
27	SD IT Hazima	2x11 Kayu Tanam	1
28	SD IT Usmani	2x11 Kayu Tanam	1
29	Taud Saqu Dar El Iman	2x11 Kayu Tanam	1
30	MDTA Nurul Anhar	Sungai Limau	6
31	MDTA Surau Batu	Sungai Limau	2
32	MTS Sei. Rambah	Sungai Limau	2
33	SDN 08 Sungai Limau	Sungai Limau	1
34	SD IT Al-Ma'arij	Sungai Limau	1
35	SD IT Al-Marhamah	Sungai Limau	1
36	SD IT Marhamah	Sungai Limau	1
37	SDN 01 Sungai Limau	Sungai Limau	2
38	SMP 3 Sungai Limau	Sungai Limau	1
39	SMP 1 Sungai Limau	Sungai Limau	1
40	Surau Batu	Sungai Limau	1
41	TPA Kalampayan	Sungai Limau	1
42	TPA Lamun Ombak	Sungai Limau	1

43	TPA Miftahul Huda	Sungai Limau	1
44	TPA Surau Dama Duku	Sungai Limau	1
45	TPA Al-Munawarah	Sungai Limau	1
46	TPA Baitul Hikmah	Sungai Limau	5
47	TPQ Darul Qur'an	Sungai Geringging	2
48	YPH Rosmani Aziz	Sungai Geringging	3
49	TPQ Surau Baru	Sungai Geringging	2
50	TPQ Almukminin	Sungai Geringging	4
51	TPQ Nurul Iman	Sungai Geringging	2
52	TPQ /TPSQ Surau Baru	Sungai Geringging	1
53	TPQ Harapan Bunda	Sungai Geringging	1
54	Raudhatul Qur'an	Sungai Geringging	3
55	TPA Surau Baru	Sungai Geringging	3
56	MITQ Ibnu Umar	Lubuk Alung	3
57	MT Jannatussalam PU	Lubuk Alung	1
58	MAN 2 Padang	Lubuk Alung	1
59	SD IT Buah Hati	Lubuk Alung	2
60	SDN 03 Lubuk Alung	Lubuk Alung	1
61	SDN 12 Lubuk Alung	Lubuk Alung	2
62	SDN 13 Lubuk Alung	Lubuk Alung	2
63	SDN 4 Lubuk Alung	Lubuk Alung	1
64	SMA Pembangunan	Lubuk Alung	1
65	SMA 1 Lubuk Alung	Lubuk Alung	1

66	TPQ Nurul Hidayah	Lubuk Alung	2
67	TPQ Al-Barakah	Lubuk Alung	1
68	TPQ Arrayyan	Lubuk Alung	4
69	SD IT Nur Hidayah	Lubuk Alung	4
70	TPQ Darul Hikmah	Lubuk Alung	1
71	TPQ Nurul Ikhlas	Lubuk Alung	1
72	MDA Al-Mubaraq	Ulakan Tapakih	3
73	Al-Mubaraq	Ulakan Tapakis	1
74	MDTA Kp. Paneh	Ulakan Tapakis	1
75	MTsN 5 Padang Pariaman	Ulakan Tapakis	2
76	MTsN Padang Panjang	Ulakan Tapakis	2
77	Ponpes Tartila	Ulakan Tapakih	2
78	RT Rambai Madani	Ulakan Tapakih	2
79	Rambai Madani	Ulakan Tapakih	1
80	SD IT Cahaya Hati	Ulakan Tapakis	3
81	TPA Surau Ampalam	Ulakan Tapakis	1
82	SMP 1 Ulakan	Ulakan Tapakis	1
83	SMAN 2 Pariaman	Ulakan Tapakis	2
84	Masjid Istiqamah	IV Koto Aur Malintang	1
85	Masjid Istiqamah Aur Malintang	IV Koto Aur Malintang	1
86	MDA Pinang Suri	IV Koto Aur Malintang	2
87	Mushalla Tabarok Batu Basa	IV Koto Aur Malintang	2
88	Nurul Amin	IV Koto Aur Malintang	2

89	Nurul Hidayah Kp. Tanjung	IV Koto Aur Malintang	3
90	Nurul Iman Batu Basa	IV Koto Aur Malintang	1
91	Nurul Yaqin Batu Basa	IV Koto Aur Malintang	2
92	Nurul Yaqin Kp. Pinang	IV Koto Aur Malintang	3
93	MDTA Mujahidin Balai Baik	IV Koto Aur Malintang	1
94	Surau Batuang	IV Koto Aur Malintang	2
95	Surau Kandis Kp. Tanjung	IV Koto Aur Malintang	1
96	Surau Kelok Simp. IV Amal	IV Koto Aur Malintang	2
97	Surau Lenggek Lancang	IV Koto Aur Malintang	2
98	MDTA Baitul Hidayah Sei. Pinang	Batang Anai	1
99	Pondok Tahfizh Jannatussalam Uj. Gunung	Batang Anai	4
100	Pondok Tahfizh Kampung Qur'ani	Batang Anai	3
101	Pondok Tahfizh Kampung Qur'ani Uj. Gunung	Batang Anai	3
102	RTQ Ar-Raudhah Padang Kunik	Batang Anai	3
103	RTQ Baity Jannaty Uj. Gunung	Batang Anai	4
104	RTQ Cahaya Qur'an Tj Basung II	Batang Anai	3
105	RTQ Darul Fikri Simpang Kataping	Batang Anai	2
106	RTQ Dzikra Titian Akar Buayan	Batang Anai	2

107	RTQ Nurul Huda	Batang Anai	2
108	RTQ Fajar Ilmi Kapalo Buayan	Batang Anai	2
109	SD Sabbihisma Batang Sariak	Batang Anai	2
110	SD IT Malik Karim Kasai	Batang Anai	1
111	SDN 08 Batang Anai	Batang Anai	2
112	SMAN 1 Batang Anai	Batang Anai	1
113	SMP 1 Batang Anai	Batang Anai	3
114	SMP 2 Batang Anai	Batang Anai	1
115	SDN 28 Batang Anai	Batang Anai	1
116	SMP 3 Batang Anai	Batang Anai	3
117	TPQ Istiqamah Pilubang	Batang Anai	1
118	TPQ Mushalla Mutiara Hasanah Kp. Apar	Batang Anai	2
119	TPQ Nur Sholihin Kuliek	Batang Anai	1
120	TPQ Nur Yaqin Petak Talao Mundam	Batang Anai	1
121	TPQ Al-Mubarak Palapa 3	Batang Anai	2
122	TPQ Al-Ikhlas Banda Gadang	Batang Anai	2
123	TPQ Al-Amin Kp. Apar	Batang Anai	1
124	Jabal Fiil	VII Koto	1
125	Darul Wustha	VII Koto	1
126	MTsS Balah Aia	VII Koto	4
127	Ponpes Jabal Fiil	VII Koto	1

128	Nahdatul Uqul	VII Koto	1
129	Ponpes Nurul Yaqin	VII Koto	3
130	Ponpes Salafiah Tarbiyah Islamiyah	VII Koto	2
131	Rumah Tahfizh Al-Qomariah	VII Koto	3
132	Rumah Tahfizh Darul Mustafa	VII Koto	2
133	SDN Unggung Terpadu	VII Koto	1
134	SDN 18 VII Koto	VII Koto	1
135	SDN 22 VII Koto	VII Koto	1
136	Surau Ketek Ampangan	VII Koto	2
137	TPA Al-Hidayah	VII Koto	1
138	TPA Al-Hidayah Sei. Ibur	VII Koto	2
139	TPA Darul Wustha	VII Koto	1
140	TPA Fisabilillah	VII Koto	1
141	TPA Jamiatul Muhiddin	VII Koto	2
142	TPA Madrasatul Ulum	VII Koto	1
143	TPA Silembang	VII Koto	1
144	TPA Surau Tangah Padang	VII Koto	1
145	TPQ Darul Wustha	VII Koto	1
146	Universitas PTIQ Jakarta	VII Koto	1
147	TPQ Darul Wustah Buluh Kasok	VII Koto	2
148	Tahfizh Surau Batu Ampalu	VII Koto	1
149	TPA Gadur	Enam Lingkung	2

150	MTsM Tonyok Koto Tinggi	Enam Lingkung	2
151	TPQ Parit Malintang	Enam Lingkung	2
152	SD IT Parit Malintang	Enam Lingkung	2
153	Pondok Qur'an Koto Tinggi	Enam Lingkung	2
154	Rumah Tahfizh Al-Mukmin	Enam Lingkung	2
155	TPQ Al-Mukmin	Enam Lingkung	1
156	TPQ An-Nahal	Enam Lingkung	2
157	TPQ An-Nahal Parit Malintang	Enam Lingkung	2
158	TPQ Nur Tanjung	Enam Lingkung	1
159	TPQ Nur Tanjung Beringin	Enam Lingkung	1
160	TPQ Rumah Tahfizh Al-Mukmin	Enam Lingkung	1
161	TPQ Surau Jawi-jawi	Enam Lingkung	3
162	TPQ Al-Ikhlas Padang Baru	Enam Lingkung	4
163	TPQ AlKautsar	Enam Lingkung	2
164	TPQ An-Nahl	Enam Lingkung	1
165	TPQ Nur Tanjung	Enam Lingkung	2
166	TPQ Surau Mansi	Enam Lingkung	1
167	TPQ Darus Salihin	Enam Lingkung	4
168	TPQ Babul Istiqamah	Enam Lingkung	1
169	TPA Al-Mubarok Koto Tinggi	Enam Lingkung	1
170	SMP 2 Enam Lingkung	Enam Lingkung	1
171	TPA Jawi-jawi	Enam Lingkung	3

172	TPA An-Nahl	Enam Lingkung	1
173	Ganting Subarang	Nan Sabaris	2
174	Dusun Parik	Nan Sabaris	2
175	Jiraik Baruah	Nan Sabaris	1
176	Kabun Mudiak	Nan Sabaris	4
177	Kampung Tangah	Nan Sabaris	1
178	Kampung Aua	Nan Sabaris	3
179	Kampung Jambak	Nan Sabaris	1
180	Kampung Kandang Koto Gadis	Nan Sabaris	2
181	Kapalo Koto	Nan Sabaris	2
182	Kampung Ladang	Nan Sabaris	1
183	Kampung Tangah	Nan Sabaris	1
184	Kurai Taji	Nan Sabaris	2
185	Lantak Mingkudu	Nan Sabaris	1
186	Lubuk Ipuh	Nan Sabaris	1
187	TPQ Nan Sabaris	Nan Sabaris	2
188	MTsN 02 Papa	Nan Sabaris	1
189	TPQ Padang Bintungan	Nan Sabaris	1
190	TPQ Padang Kalam	Nan Sabaris	1
191	Padang Kandang Pulau Air	Nan Sabaris	4
192	Paguh Dalam	Nan Sabaris	1
193	Paguh Duku	Nan Sabaris	1
194	Pasa Baru	Nan Sabaris	1

195	Pasa Dusun	Nan Sabaris	2
196	Pauh Kamba	Nan Sabaris	1
197	Pauh Kamba Hilia	Nan Sabaris	1
198	Rimbo Dulang Dulang	Nan Sabaris	1
199	TPQ Pinang	Nan Sabaris	3
200	Rumah Tahfizh Rahma Royan	Nan Sabaris	1
201	SMP IT Madinah Al-Fatih	Nan Sabaris	1
202	SMA 1 Nan Sabaris	Nan Sabaris	3
203	Rumah Tahfizh	Nan Sabaris	1
204	Rumah Tahfizh Nurul Qur'an	Nan Sabaris	1
205	SMP IT Pauh Kambar	Nan Sabaris	1
206	Teluk Nibung	Nan Sabaris	3
207	MDTA Al-Hikmah	Nan Sabaris	1
208	Sungai Laban	Nan Sabaris	1
209	Sunur Tengah	Nan Sabaris	1
210	Aisyiyah	2x11 Enam Lingkung	2
211	Cahaya Hati	2x11 Enam Lingkung	2
212	Dar El Iman	2x11 Enam Lingkung	2
213	Darul Mukminin	2x11 Enam Lingkung	1
214	Ashabul Kahfi	2x11 Enam Lingkung	3
215	Istiqamah	2x11 Enam Lingkung	1
216	Muhajirin	2x11 Enam Lingkung	2
217	Nur Muhammad	2x11 Enam Lingkung	1

218	Ponpes Modren Subulussalam	2x11 Enam Lingkung	1
219	SD IT Ashabul Kahfi	2x11 Enam Lingkung	1
220	SMA 1	2x11 Enam Lingkung	2
221	SMP IT	2x11 Enam Lingkung	2
222	Masjid Jami'	2x11 Enam Lingkung	2
223	Tawalib	2x11 Enam Lingkung	1
224	Syarafu Anam	2x11 Enam Lingkung	1
225	Ar- Rahman	Padang Sago	1
226	Al-Jamatul Rahman	Padang Sago	1
227	Bustanul Ulum	Padang Sago	2
228	MDA Darul Ulum Lubuk Aro	Padang Sago	1
229	MDA Dinul Ma'ruf	Padang Sago	2
230	MDA Madinatul Ilmi	Padang Sago	2
231	MTsN 10 Padang Sago	Padang Sago	2
232	Pesantren Tahfizh Darul Qur'an	Padang Sago	1
233	TPA Darul Ulum	Padang Sago	1
234	TPA Hidayatullah	Padang Sago	1
235	TPA Aro Jaya	Padang Sago	3
236	TPA Ar-Rahman	Padang Sago	1
237	TPA Nurul Ikhsan	Padang Sago	2
238	TPA Nurul Iman	Padang Sago	2
239	TPQ Aljamaturahmah	Padang Sago	1
240	TPQ Nurul Ikhsan	Padang Sago	2

241	TPQ Muhajirin	Padang Sago	1
242	TPQ An-Nur Pd. Sago	Padang Sago	2
243	TPQ Aro Jaya	Padang Sago	2
244	TPQ Ar-Rahman	Padang Sago	1
245	Al-Aziz Kp. Dalam	V Koto Kp. Dalam	1
246	Kampung Al-Qur'an	V Koto Kp. Dalam	3
247	Al- Huda	V Koto Kp. Dalam	1
248	Nurul Iman	V Koto Kp. Dalam	2
249	Nurul Umi	V Koto Kp. Dalam	2
250	Nuril Umi	V Koto Kp. Dalam	3
251	Nurul Hidayah	V Koto Kp. Dalam	2
252	Surau Kabun	V Koto Kp. Dalam	4
253	Sutan Jalan	V Koto Kp. Dalam	1
	Jumlah		**445**

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berikut data Hafizh/Hafizhah yang lolos Gebupafa tahun 2023 :

Hafiz/Hafizah Yang Lolos Gebupafa 2023

No	KATEGORI HAFIZ/HAFIZHAH	JUMLAH (ORANG)
1	Kategori 1 Juz	350
2	Kategori 5 Juz	77
3	Kategori 10 Juz	17
4	Kategori 20 Juz	0
5	Kategori 30 Juz	1
	JUMLAH	**445**

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Meningkatkan jumlah Lembaga Pendidikan Alquran sebagai penghasil Hafiz/Hafizah;
2. Meningkatkan jumlah anggaran beasiswa bagi hafiz/hafizah yang lolos seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) Kabupaten Padang Pariaman.

II. Sasaran Strategis Meningkatkan pengawasan/monitoring dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
				Target	Realisasi	%	
2.	Meningkatkan pengawasan/monitoring dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	1. Persentase BUMD dengan kondisi baik	%	100%	50%	50%	-

Badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD merupakan organisasi yang memiliki status korporat yang independent dan dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas *public*. Padang Pariaman memiliki 2 BUMD yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja dan berdampak langsung terhadap PDRB/Income Per Kapita ADHB Kabupaten Padang Pariaman

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023			
	Target	Realisasi	%	Kategori
Persentase BUMD dengan kondisi sehat	100%	50%	50%	Gagal

Pada Indikator ini untuk pencapaian target yang telah di tetapkan di atas, maka dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan :

✓ Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Sub Kegiatan:

✓ Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank merupakan pendekatan kualitatif dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai beberapa faktor yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas (POJK) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Uraian berikut ini berdasarkan ketentuan POJK No. 3/POJK.03/2022 dan SE OJK No. 11/SEOJK.03/2022 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

Perbandingan Target dan Realisasi

Persentase BUMD dengan kondisi sehat Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase BUMD dengan kondisi sehat	%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	Kurang sehat

Penilaian dilakukan dengan mengkuantifikasi aspek POJK dan faktor penilaian terhadap pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan. Penilaian menggunakan sistem kredit dengan nilai peringkat komposit dengan Tingkat kesehatan digolongkan dalam 5 kategori yakni:

- PK 1 (Sangat Sehat)
- PK 2 (Sehat)
- PK 3 (Cukup Sehat)
- PK 4 (Kurang Sehat)
- PK 5 (Tidak Sehat)

Berdasarkan penilaian tingkat kesehatan PT.BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman per tanggal 31 Desember 2023 dengan beberapa rasio yang telah ditetapkan didapat total peringkat dengan nilai PK 2 dibandingkan dengan indikator penilaian kesehatan menurut POJK adalah predikat Sehat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman posisi akhir 31 desember 2023 adalah "sehat".

Sementara itu, untuk PDAM berdasarkan Surat Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR nomor CK.0506-DC/165 tanggal 31 Mei 2023, Indikator ukuran Kinerja PDAM menggunakan buku petunjuk teknis penilaian kinerja PDAM memperoleh nilai 2,53 dan masuk kategori "kurang sehat" berdasarkan Keputusan Ketua BPPSPAM nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010 sebagai berikut:

Nilai	Kategori
Diatas 2,8	Sehat
2,2 s/d 2,8	Kurang Sehat
Dibawah 2,2	Sakit

Hasil Penilaian Kinerja terhadap PDAM Kabupaten Padang Pariaman Tahun Kerja 2022 yang keluar ditahun 2023 adalah sebagai berikut:

Aspek	Nilai
Keuangan	0,65
Pelayanan	0,50

Operasional	0,83
SDM	0,55
Jumlah	**2,53**

Sementara berdasarkan Kemendagari 47 Tahun 1999 untuk penilaian kinerja PDAM Kabupaten Padang Pariaman Tahun Kerja 2022 yang di keluarkan di tahun 2023 pada tanggal 31 Mei 2023 dengan kategori "Kinerja Cukup"

Aspek	Nilai
Keuangan	24
Administrasi	10,42
Operasional	20,43
Jumlah	**54,85**

Monitoring dan Pengawasan Terhadap PDAM dan BPR Tahun 2023

c). Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 13.

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase BUMD dengan kondisi sehat	%	100%	100%	100%	100%	50%	**50%**	**50%**	-

Realisasi Indikator Kinerja "BUMD dengan kondisi sehat pada tahun 2021 sebesar 50% dengan target RPJMD sebesar 100%. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 50% dengan target RPJMD sebesar 100%. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 50% dengan target RPJMD sebesar 100%.

d). Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Adapun Faktor Pendukung Keberhasilan BUMD (BPR)

1. Dari aspek tatakelola

Secara Struktur organisasi lengkap dan karyawan sudah terpenuhi sesuai dengan aturan dari ojk

2. Dari aspek manajemen resiko

Untuk manajemen resiko terkontrol dengan baik baik dari segi pinjaman/kredit maupun dari pengeluaran perbankan

3. Tentang permodalan

Karena modal dari pemda sangat kuat sebesar 6,7 miliar dari pemda, sedangkan minimal dari ojk yaitu sebesar 6 Miliar rupiah dan untuk rasio tentang permodalan kita hamper 80 persen sedangkan ketentuan minimal hanya 12 persen

Kondisi kesehatan BUMD dapat diukur dengan berbagai metrik, termasuk tingkat keuntungan, pertumbuhan, kinerja keuangan, dan faktor-faktor lainnya. Namun, perhitungan

persentase BUMD yang dalam kondisi sehat akan bergantung pada definisi kesehatan yang digunakan.

Pada umumnya, pemerintah atau badan yang berwenang dalam mengatur BUMD akan memiliki standar tertentu untuk menilai kesehatan BUMD. Misalnya, beberapa indikator yang sering digunakan adalah:

1. **Pertumbuhan Pendapatan**: Peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun menunjukkan kesehatan keuangan yang baik.
2. **Rasio Utang**: Rasio utang yang rendah menunjukkan BUMD yang mampu mengelola utangnya dengan baik.
3. **Pertumbuhan Laba**: Pertumbuhan laba yang stabil atau meningkat menandakan kesehatan operasional.
4. **Rasio Likuiditas**: Rasio likuiditas yang sehat menunjukkan kemampuan BUMD untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
5. **Pemenuhan Kewajiban**: Kemampuan BUMD untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu.

e). Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya sudah sesuai aturan OJK yaitu berapa jumlah SDM dan berapa pengeluaran untuk sumber daya sesuai aturan OJK.

Tidak boleh terjadi kekosongan dan kelebihan sumber dayanya.

f). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program penunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu

1. Secara Tatakelola ini

   Dari memperkuat dari segi perencanaan yang matang, proses (prosedur kerja) yang mana hasil tidak tidak terlalu jauh dari keberhasilannya sesuai dengan yang direncanakan. Melakukan Renovasi product dan product yang di hasilkan sesuai dengan yang diharapkan
2. Manajement resiko

   Tidak boleh lewati batas batas manajement resiko dari ojk misalnya likuiditas tidak boleh diatas 12 % untuk menjaga Kesehatan BUMD
3. Permodalannya

Menambahkan modal kita dari para pemegang saham dan juga melakukan 30 % laba dari tahun sebelumnya di cadangkan, dilakukan setiap tahunnya (untuk perkuat permodalan kita)

III. Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
3.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	1.	Nilai Sakip Setda yang dievaluasi Inspektorat Kab Padang Pariaman	nilai	A	BB	90%	-

Demi mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yakni "Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB", maka Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut, salah satunya menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yakni "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Setda Kab. Padang Pariaman".

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Kab.Padang Pariaman. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2023			
	Target	Realisasi	%	Kategori
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Setda Kab. Padang Pariaman	A	BB	90	"Berhasil"

Pada Indikator ini untuk pencapaian target yang telah di tetapkan di atas, maka dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

✓ Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

✓ Sub Kegiatan:

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023

SAKIP untuk tahun 2022 yang dievaluasi tahun 2023 mendapatkan nilai BB dari Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh penurunan baik dari nilai maupun dari peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan Target dan Realisasi

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Setda Kab. Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Setda Kab. Padang Pariaman	%	BB	A%	100%	BB	BB	100%	Baik

SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh peringkat 18 dari 43 OPD dan Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai 75,10 turun dibandingkan tahun 2022 yakni dengan nilai 87,70.

Lampiran 1

DAFTAR NILAI HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP OPD
TAHUN 2023 BERDASARKAN PERINGKAT

No	Komponen/sub komponen	Nilai Absolut	Interprestasi
1	Dinas Kesehatan	82.25	A
2	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	81.75	A
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.30	A
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	80.85	A
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80.60	A
6	Inspektorat	80.45	A
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	80.35	A
8	Dinas Komunikasi dan Informasi	80.35	A
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80.25	A
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.25	A
11	Badan Pengelola Keuangan Daerah	80.10	A
12	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	80.10	A
13	Kecamatan Lubuk Alung	78.55	BB
14	Dinas Perikanan	77.85	BB
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	77.55	BB
16	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	75.40	BB
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75.20	BB
18	Sekretariat Daerah	75.10	BB
19	Sekretariat DPRD	74.85	BB
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74.20	BB
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	73.35	BB
22	Kecamatan Nan Sabaris	72.60	BB
23	Dinas Perhubungan	72.35	BB
24	Kecamatan VII Koto	72.35	BB
25	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	71.95	BB
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.85	BB
27	Kecamatan Batang Anai	70.70	BB
28	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	70.45	BB
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	70.40	BB
30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	70.35	BB
31	Kecamatan Patamuan	70.30	BB
32	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	70.25	BB
33	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	69.05	B
34	Kecamatan Sungai Geringging	68.55	B
35	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	68.10	B
36	Kecamatan Batang Gasan	65.70	B
37	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	65.45	B
38	Kecamatan Enam Lingkung	65.15	B
39	Kecamatan V Koto Timur	64.85	B
40	Kecamatan Sintoga	64.70	B
41	Kecamatan Sungai Limau	61.35	B
42	Kecamatan Padang Sago	60.65	B
43	Kecamatan Ulakan Tapakis	60.35	B

INSPEKTUR KABUPATEN,

HENDRA ASWARA, S.STP,MM,CGCAE
Pembina TK.I NIP. 19810925 199912 1 002

[‘

Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP OPD Oleh Inspektorat Kab.Padang Pariaman Tahun 2023

c). Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Setda Kab. Padang Pariaman	%	BB	BB	BB	BB	A	**A**	**B**	-

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya dengan formula pengukuran sebagai berikut :

Formulasi = Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB

SAKIP untuk tahun 2021 yang dievaluasi tahun 2022 mendapatkan nilai A dari Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai yang naik, namun secara peringkat turun dari tahun sebelumnya. Tahun ini SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh peringkat 6 dari 43 OPD dan Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai 87,70 meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya 86,45.

Nilai absolute yang diperoleh juga naik menjadi 86,45 dari tahun sebelumnya yang hanya 86,29 kenaikan ini menyebabkan interprestasi tetap "A", meski secara peringkat turun. Perolehan nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini melebihi target yang ditetapkan di awal tahun. Capaian ini dalam hal penilaian SAKIP OPD dan diharapkan juga mampu mendongkrak Sakip Pemerintah Daerah hasil evaluasi Kemenpan RB

d). Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2023 ini adalah

1. Adanya komitmen untuk menjalankan semua Indikator yang telah ditetapkan dalam penyusunan LAKIP untuk Sekretariat Dareah
2. Adanya dukungan pimpinan Dalam pengumpulan data dari bagian bagian serta berbagai pihak pemangku kepentingan.
3. Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam rangka pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya
4. *Reenginering* dan pengembangan aplikasi e-SAKIP Kabupaten Padang Pariaman menjadi aplikasi Sistem Informasi Kinerja (Simak Kinerja) Kabupaten Padang Pariaman kerjasama antara Tim SAKIP dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. Aplikasi tersebut dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah untuk melaporkan data akuntabilitas kinerja masing-masing.
5. Melakukan *workshop* penyesuaian pohon kinerja dan dokumen perencanaan bagi seluruh Kepala Bagian dan jajarannya

e). Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya dalam Penyusunan dan penyumpulan data dari bagian yang belum sepenuhnya memahami dalam penyusunan dokumen Sakip Sekretariat Daerah sehingga tidak semua data yang dimaksudkan didapat sesuai dengan apa yang Tidak boleh terjadi kekosongan dan kelebihan sumber dayanya.

f). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam Kegiatan bagian Perencanaan dan Keuangan terdapat Program/kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan yang bisa dilaksanakan dalam mencapai tujuan dari Indikator Kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Setda Kab. Padang Pariaman" sehingga dapat direalisasikan dan dilaksanakan penyusunan dokumen Sakip Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

IV. Sasaran Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
4.	Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.	Persentase penyampaian laporan LPPD OPD tepat waktu	%	90%	100%	112%	-

Untuk mendukung IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yakni "Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)", maka Sekretariat daerah Kabupaten Padang Pariaman juga menetapkan IKU Sekretariat Daerah yakni "Persentase Penyampaian Laporan LPPD OPD Tepat Waktu" dan diharapkan dapat menunjang IKU Pemerintah Daerah tersebut. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam sebuah program dan kegiatan.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini menjadi salah satu indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman periode 2021-2026. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perbandingan Target dan Realisasi

Persentase Penyampaian Laporan LPPD OPD tepat waktu

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023			
	Target	Realisasi	%	Kategori
Persentase Penyampaian Laporan LPPD OPD tepat waktu	90%	100%	112%	"Sangat Berhasil"

Pada Indikator ini untuk pencapaian target yang telah di tetapkan di atas, maka dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan :

✓ Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan:

✓ Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berikut ini adalah formulasi pengukuran Indikator Kinerja Utama "Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ LPPD" :

Formulasi = Nilai LPPD Hasil Penilaian Kemendagri

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mana setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan LPPD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Mendukung IKU Pemerintah Daerah terkait Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD), maka Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama berupaya dengan cara mengadakan Bimtek percepatan penyusunan dokumen LPPD dan pengumpulan data terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan dengan melibatkan seluruh OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Bimtek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyusunan LPPD di Kabupaten Padang Pariaman. Harapannya setelah mengikuti Bimtek, para peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten padang Pariaman dapat melaksanakan tugas penyusunan LPPD dan pengumpulan data IKK secara optimal dan tepat waktu.

LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dilaporkan tahun 2022 dilaporkan pada tanggal 31 Maret 2022 dan tepat waktu sesuai ketentuan, artinya OPD menyelesaikan penyusunan dan pengumpulan data LPPD sebelum batas akhir penyampaian LPPD tingkat kabupaten. LPPD dan data Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan yang dikumpulkan masing-masing OPD ini dijadikan penunjang

untuk LPPD tingkat pemerintah daerah.

Penyerahan LPPD Kabupaten Padang Pariaman dan Workshop Penyusunan LPPD Tahun 2023

b). Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai LPPD Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ LPPD	Nilai	2,700	3,2904	121,87	3,300	3,2904*	99,71*	Berhasil

***Sumber** : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023*

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun terakhir sudah melebihi target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2023 masih menunggu proses penetapan peringkat melalui keputusan dari Kementerian Dalam Negeri yang sampai saat ini belum ditetapkan. Nilai LPPD Kabupaten Padang Pariaman yang ada pada saat ini adalah nilai pada tahun 2022 dengan skor 3,2904 (sedang).

c). Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD				Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyampaian Laporan LPPD OPD tepat waktu	%	80%	85%	90%	95%	85%	**90%**	**95%**	**-**

Nilai LPPD Kabupaten Padang Pariaman yang ada pada saat ini adalah nilai pada tahun 2022 dengan skor 3,2904 (sedang). Berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri, hasil evaluasi LPPD seluruh Indonesia oleh Tim nasional EPPD sudah ada di Kemendagri, akan tetapi untuk penetapannya melalui Keputusan Menteri belum ada, sedangkan untuk membahas keputusan tersebut Tim nasional akan melakukan rapat kembali pada tanggal 26 Januari 2023 yang langsung dipimpin oleh Bapak Sekjen Kemendagri dengan peserta eselon 1 dari Kemenkeu, KemenpanRB, KemenPPN/Bappenas, BPKP, BPS dan Kemitraan.

d). Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Kendala yang dihadapi dalam mencapai nilai LPPD sebagai berikut :

1. Tidak semua Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilaksanakan oleh OPD pengampu karena keterbatasan anggaran ;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam pelaksanaan program kegiatan menyangkut Indikator Kinerja Kunci (IKK).
3. Indikator kinerja IKK dalam LPPD banyak yang belum sinkron dengan dokumen perencanaan.

Strategi pemecahan masalah :

1. Memprioritaskan anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masing-masing urusan ;
2. Menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk pelaksanaan program kegiatan menyangkut Indikator Kinerja Kunci (IKK).
3. Sinkronisasi Indikator kinerja IKK dalam LPPD dengan dokumen perencanaan.

e). Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada untuk menunjang target pencapaian indikator kinerja. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk nilai LPPD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023

IKU	Program	Kegiatan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
Nilai LPPD	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2023	Rp.126.072.000	Rp.121.426.552	96,31%

***Sumber** : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023*

Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Nilai LPPD

Pemerintah Daerah melakukan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan LPPD untuk memperoleh capaian nilai LPPD yang lebih baik. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya :

(1) Pengumpulan data Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan yang diampu oleh seluruh OPD terkait ;

(2) Reviu terhadap data Indikator Kinerja Kunci (IKK) oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman ;

(3) Melaksanakan workshop atau bimbingan teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

(4) Finalisasi penyusunan LPPD Kabupaten Padang Pariaman

f). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk memperoleh capaian nilai LPPD yang lebih baik, dilakukan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan LPPD. Sedangkan upaya yang dilakukan diantaranya :

(1) Pengumpulan data Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan yang diampu oleh seluruh OPD terkait ;

(2) Reviu terhadap data Indikator Kinerja Kunci (IKK) oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman ;

(3) Melaksanakan workshop atau bimbingan teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

(4) Finalisasi penyusunan LPPD Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama yang berperan sebagai leading sector dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun, yang dimana

masih terdapat kendala dalam pemahaman yang kurang dari pengelola data pada masing-masing Perangkat Daerah terkait definisi operasional IKK. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah agar dapat memaksimalkan kinerja guna mencapai nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) yang lebih baik lagi.

Berikut beberapa dokumentasi dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan LPPD selama tahun 2023.

V. Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang indeks kepuasan masyarakat yang bernilai baik	%	85%	100%	118%	-

Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas publik diantaranya dengan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman rutin setiap tahun mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan sekaligus untuk mendengarkan dan menyerap asprirasi masyarakat tentang kebutuhan dan harapan terkait layanan yang diberikan.

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada RPJMD periodesisasi 2021-2026 juga menyebabkan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menjadi “Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang indeks kepuasan masyarakat yang bernilai baik”, maka untuk mengukur itu semua perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap 15 unit kerja dari tahun sebelumnya yang hanya 10 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang indeks kepuasan masyarakat yang bernilai baik	90%	100%	112%	"Sangat Berhasil"

Pada Indikator ini untuk pencapaian target yang telah di tetapkan di atas, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan :

Penataan Organisasi

- ✓ Sub Kegiatan:

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Secara keseluruhan rata-rata nilia IKM Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 adalah 85,12 dengan kategori "baik". Persentase realisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang indeks kepuasan masyarakat yang bernilai baik mencapai 100%. Dari total 15 unit kerja yang dilakukan penilaian pada tahun 2023 terdapat 3 unit kerja memproleh kategori "sangat baik" dan 12 unit kerja memperoleh kategori "baik".

b). Perbandingan Capaian Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan realisasi IKU "Indeks Pelayanan Publik" tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Tahun 2023			
		Tahun 2022	Target	Realisasi	Selisih (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,65	4,66	3,88	83,26	Berhasil

***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebesar 4,65 dengan Kategori "A" atau Pelayanan Prima, dengan rincian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 4,74 dengan Kategori "A" atau Pelayanan Prima dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memperoleh nilai 4,56 kategori "A" atau Pelayanan Prima, sehingga presentase capaian tahun 2022 sebesar 101,97%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami penurunan indeks pelayanan publik dimana presentase capaian hanya sebesar 83,26% dari target yang ditetapkan sebesar 4,66 hanya terealisasi sebesar 3,88 mengalami selisih penurunan indeks capaian kinerja sebesar 18,71% dari tahun sebelumnya.

c). Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,56	4,57	4,49	4,65	3,88

Realisasi Indikator Kinerja "Indeks Pelayanan Publik" pada tahun 2021 yaitu 4,49 dengan target RPJMD sebesar 4,56. Pada tahun 2022 realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi 4,65 dengan target RPJMD 4,56. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami penurunan menjadi 3,88 dengan target RPJMD 4,57. Capaian tahun 2023 belum memenuhi target yang di tetapkan pada RPJMD karena adanya perubahan pada Lokus yang di evaluasi oleh Kemenpan RB

d). Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna layanan, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut terdapat beberapa faktor pendukung tercapainya target kinerja, antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Padang Pariaman dengan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKPP) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Menjadikan hasil evaluasi dan rekomendasi KemenPANRB pada tahun sebelumnya sebagai salah satu patokan dalam perbaikan pelayanan.
3. Bagian Organisasi berupaya melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan serta pendampingan terhadap UKPP yang menjadi lokus evaluasi.
4. Respon yang maksimal dari UKPP yang di evaluasi/yang dinilai, termasuk juga komitmen dari Kepala Dinas terkait/UKPP dalam mempersiapkan dokumen maupun sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik.

Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan juga tidak terlepas dari hambatan dan masalah yang terjadi diantaranya adalah :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan di UKPP.
2. Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan kopetensi jabatan pada UKPP.
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
4. Lokus evaluasi yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

e). Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100\% - \frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaya}\ x\ 100\%$$

Pada Tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 917.585.329,00 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 155.033.200. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 27,63%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 diperoleh efisiensi sebesar 1,66% (anggaran sebesar Rp 3.382.673.042,108 realisasi sebesar Rp 3.326.569.574.317). Persentase efisiensi ini secara teori jauh lebih besar dibandingkan tahun 2022, sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya serta pada kegiatan dan hasil nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya.

f). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut diantaranya:

1. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

   ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyrakat (SKM) dengan Anggaran Rp. 50.000.000 dan realisasi anggarannya Rp. 49.062.000 atau dengan persentase 98,12%. Hasil dari SKM ini menjadi salah satu patokan atau standar perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tertuang sebagai janji perbaikan layanan pada UKPP.

Gambar

Publikasi Hasil SKM dan Sosialisasi Pelaksanaan SKM

***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023*

✓ Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana dengan Anggaran Rp. 29.994.875 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 43.903.967 atau dengan persentase 97,53%. Salah satu yang menjadi objek monitoring dan evaluasi pelayanan publik adalah terkait dengan penilaian kepatuhan standar pelayanan oleh Ombudsman RI setiap tahunnya. Tahun 2023 hasil penilaian Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan Padang Pariaman berada pada Zona Hijau

dengan indeks kepatuhan rata-rata 81,23 opini kepatuhan kualitas tinggi. Hasil penilaian tersebut menjadi bagian terpenting dalam pengukuran/indikator perbaikan standar pelayanan pada UKPP.

Gambar

Penganugerahan Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI yang diberikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman

***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023*

Hasil Survei IKM Tahun 2023

No	Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinarja Unit Pelayanan
1	Dinas Sosial dan P3A	82,60	B	Baik
2	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	93,90	A	Sangat Baik
3	RSUD Kabupaten Padang Pariaman	89,25	A	Sangat Baik
4	DPMPTSP	76,68	B	Baik
5	BKPSDM	82,15	B	Baik
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,08	B	Baik
7	Puskesmas Lubuk Alung	84,74	B	Baik
8	PDAM Kabupaten Padang Pariaman	89,98	A	Sangat Baik

9	Puskesmas Sungai Limau	88,11	B	Baik
10	Disparpora	83,12	B	Baik
11	Kecamatan Lubuk Alung	85,13	B	Baik
12	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	86,20	B	Baik
13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	84,20	B	Baik
14	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	84,50	B	Baik
15	Kecamatan Sungai Geringging	86,21	B	Baik

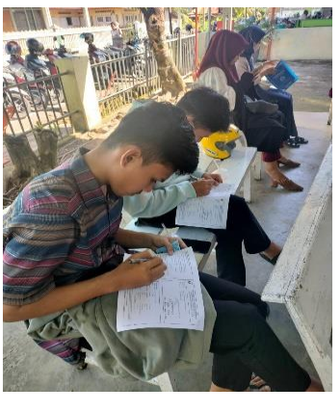

Pelaksanaan Survei IKM tahun 2023

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berikut capaian IKD dan SPM Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 :

Tabel 2.9

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat Daerah

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	28%	100%	100%	100%	30	n/a	30%	31%	
2	PDRB/Income Per Kapita ADHB	Persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	49,46	100 %	100 %	100 %		n/a	55,35	58,72	
3	Indeks Pelayanan Publik	Jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	A	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	B	n/a	A	A	
4	Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	BB	60 (cukup)	60 (cukup)	60 (cukup)	B	n/a	BB	BB	

	Kemenpan RB										
5	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	2.800 (Tinggi	100%	100%	100%	2,51	n/a	3.000 (Sangat Tinggi)	3.050 (Sangat Tinggi)	
6	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti.	1300	14%	15%	15%	1400	n/a	1500	1600	
7	Indeks reformasi birokrasi	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	63	100%	100%	100%	65,04	n/a	65	66	
8	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	76,33	100%	100%	100%	100	n/a	77,33	78,16	
9	Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	12	1400	1500	1600	14,97	n/a	14	15	
10	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan	Indeks reformasi birokrasi	100	64	65	66	100	n/a	100	100	

	masyarakat										
11	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	100	76,83	77,33	78,16	100	n/a	100	100	
12	Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	12	100	100	100	26,58	n/a	14	15	
13	Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	100	100	100	100	100	n/a	100	100	
14	Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	75	13	14	15	72	n/a	80	85	
15	Perentase Laporan Realisasi kegiatan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	100	100	100	100	100	n/a	100	100	
16	Persentasen peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan	Persentase Rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk	90	75	80	85	30	n/a	100	100	

	daerah	hukum daerah									
17	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan	Perentase Laporan Realisasi kegiatan Perangkat Daerah yang tepat waktu	90	100	100	100	30	n/a	100	100	
18	Persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	Persentasen peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	90	95	100	100	30	n/a	100	100	
19	Persentase kerjasama informasi dengan mass media	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan	90	95	100	100	30	n/a	100	100	
20		Persentase acara daerah yang sesuai standar keprotokolan		95	100	100		n/a	100	100	
21		Persentase kerjasama informasi dengan mass media		95	100	100		n/a	100	100	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwasannya Indiktor Kinerja Daerah (IKD) tahun 2023 sebanyak 3 Indikator yaitu Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa mempunyai target 1300 dengan capaian target di tahun 2023 sebanyak 1400, Indeks reformasi birokrasi yang mempunyai target dengan nilai 63 dan capaiannya di tahun 2023 mencapai nilai 65,04 dan Persentase Pelayanan dasar yang memenuhi standar dengan target 76,33 dan realisasi capaian di tahun 2023 mencapai nilai 100. jadi dapat di simpulkan Sekretariat Daerah mempunyai indikator sasaran yang termasuk kedalam IKD pencapaiannya sudah melebihi capaian target yang diberikan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

a. Tingkat Kinerja Sekretariat dari indikator terdapat ....indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
   1. Persentase Terpenuhinya medical Check Up KDH/WKDH
   2. Persentase OPD yang tepat tugas dan fungsinya
   3. Persentase perangkat daerah dengan nilai sakip A ke atas
   4. Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP hasil evaluasi Kemenpan
   5. Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah
   6. Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri
   7. Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi
   8. Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat

- Penyaluran hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial masyarakat terkendala pada lambatnya pengurus masjid/mushalla/ majelis taklim

melengkapi persyaratan penyaluran hibah, serta belum memberikan laporan realisasi hibah yang diterima

- Perlu peningkatan penambahan anggaran pada kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) agar lebih banyak hafiz/hafizah penerima *reward*/hadiah/beasiswa Gebupafa ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.
- Pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Sosial dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat terkendala karena adanya *recofusing* anggaran sehingga anggaran pada sub kegiatan ini tidak tersedia

2. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
   - Belum adanya pemetaan kerja sama daerah.
   - Rendahnya respon OPD terhadap Prosedur Kerja sama daerah.
   - Rendahnya partisipasi perangkat daerah atas kegiatan kerja sama yg dilaksanakan
   - Masih banyaknya kerja sama daerah yang blm tertib sesuai aturan.

3. Bagian Hukum
   - Proses penjadwalan harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham membutuhkan waktu yang agak lama karena banyaknya Ranperda dan Ranperbup 19 Kabupaten/Kota yang masuk ke Kanwil Kemenkumham
   - Maih kurangnya pemahaman perangkat daerah mengenai *Legal Drafting* penyusunan produk hukum, sehingga menyebabkan lambatnya proses penyusunan produk hukum.
   - Lambatnya Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil perbaikan SK, Perbup dan Perda sehingga membuat terhambatnya/ lambatnya pekerjaannya
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
   - Masih banyak OPD yang belum melaksanakan transaksi belanja dengan menggunakan e-katalog local
   - Anggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia PBJ
   - Kurangnya jumlah fungsional pengelola PBJ sebagaimana yang direkomendasikan oleh LKPP.
   - Belum maksimalnya pengunaan aplikasi SPSE dalam penginputan E-kontrak.

5. Bagian Administrasi Pembangunan
   - Masih ada OPD yang belum patuh menyerahkan laporan tepat waktu
   - Terbatasnya anggaran, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi tidak bisa optimal
6. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   - Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh OPD teknis karena kurangnya anggaran.
   - Lamanya terbit data PDRB/income per kapita baru di publish di Februari tahun berikutnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berdampak pada pengambilan keputusan.
   - Tidak terlaksananya kegiatan Bimtek BUMD/BLUD
   - Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga harga pupuk tidak terpantau.
7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   - Pelayanan keprotokolan kegiatan bupati, Wabup dan sekda belum maksimal karena kurangnya kompetensi SDM sebagai protokol dan kurangnya SDM.
   - Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi keprotokolan seperti kendaraan roda empat, laptop dan kamera.
8. Bagian Perencanaan dan Keuangan
   - Masih rendahnya pemahaman pejabat pengelola keuangan yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap poroses perencanaan, proses penganggaran maupun tentang pengelolaan keuangan daerah.
   - Belum terkoordinasinnya perencanaan bagian-bagian pada lingkup lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan perencanaan yang bersifat mandiri menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya dampak dari program kegiatan tidak maksimal.
   - Bendahara bagian-bagian yang masih kurang paham terkait pelaksanaan aturan, sehingga memperlambat administrasi.
   - Proses meminta data ke bagian-bagian yang masih memakan waktu cukup lama, sehingga memperlambat proses pembuatan laporan.
   - Proses perencanaan belum terlalu mengarah kepada skala prioritas dan indikator kinerja utama.
9. Bagian Umum
   - Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM di Bagian Umum.

- Terbatasnya sarana dan prasarana di Bagian Umum.
- Terjadinya rasionalisasi terhadap anggaran akibat terbatasnya anggaran.

10. Bagian Organisasi

- Substansi Indikator penilaian yang belum tersosialisasi dengan baik dari Kemenpan RI
- Belum maksimalnya koordinasi dalam pelaksanaan 8 aspek penilaian RB, Pemahaman OPD pelaksana terkait dengan substansi RB.
- Agen Perubahan tingkat daerah belum berjalan maksimal.
- Anggaran belum maksimal baik dalam tatalaksana grand desain maupun pelaksanaan, tertib administrasi & dokumen belum terlaksana

2.4 **Review Terhadap Rancangan Awal Renja**

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat

memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2025 (T-C 31)

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana(Rp.000)**	
	SEKRETARIAT DAERAH				**37.118.839.640**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**37.118.839.640**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA	Sekretariat Daerah	***Persentase Rekomendasi LHE SAKIP Sekretariat Daerah yang ditindaklanjuti***	***A***	***33.882.839.740***	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA***	Sekretariat Daerah	***Persentase Rekomendasi LHE SAKIP Sekretariat Daerah yang ditindaklanjuti***	***A***	***33.882.839.740***	
			Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	***100%***				***Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti***	***100%***		
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah	***BB***				***Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah***	***BB***		

			Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan dan Operasional Pimpinan sesuai Aturan	***100%***				***Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan dan Operasional Pimpinan sesuai Aturan***	***100%***		
			Persentase fasilitasi keprotokolan kegiatan daerah yang sesuai aturan,	***BB***				***Persentase fasilitasi keprotokolan kegiatan daerah yang sesuai aturan,***	***BB***		
			Persentase kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	***100%***				***Persentase kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi***	***100%***		
			Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang dievaluasi	***BB***				***Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang dievaluasi***	***BB***		
			Persentase Peta Jabatan yang Disusun Tepat Waktu	***100%***				***Persentase Peta Jabatan yang Disusun Tepat Waktu***	***100%***		
			Persentase UKPP yang difasilitasi	***BB***				***Persentase UKPP yang difasilitasi***	***BB***		
			Persentase Ketersediaan Data Penyusunan LKJiP	***100%***				***Persentase Ketersediaan Data Penyusunan LKJiP***	***100%***		

	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		**Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu**	**100%**	**205.000.250**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**		**Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu**	**100%**	**205.000.250**	
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	**100%**				**Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah**	**100%**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	155.000.050	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	155.000.050	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.200	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		**Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan**	**100%**	**22.441.000.998**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**		**Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan**	**100%**	**22.441.000.998**	
	Penyediaan Gaji dan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	225/14	21.974.560.1	Penyediaan Gaji dan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	225/14	21.974.560.19	

Tunjangan ASN		Tunjangan ASN	Orang/bulan	98	Tunjangan ASN		Tunjangan ASN	Orang/bulan	8	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	386.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	386.400.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	40.040.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	40.040.800	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	40.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**	**12 Laporan**	**17.995.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**	**12 Laporan**	**17.995.000**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	12 Laporan	17.995.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	12 Laporan	17.995.000	

	Daerah pada SKPD				Daerah pada SKPD			
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**1. Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat 2. Jumlah ASN Terfasilitasi Kenaikan Gaji Berkala 3. Jumlah SKP ASN Semester dan Akhir Tahun 4. Jumlah ASN yang disediakan pakaian Dinas**	**63 orang**	**1.217.650.700**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**1. Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat 2. Jumlah ASN Terfasilitasi Kenaikan Gaji Berkala 3. Jumlah SKP ASN Semester dan Akhir Tahun 4. Jumlah ASN yang disediakan pakaian Dinas**	**63 orang**	**1.217.650.700**	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.042.650.700	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.042.650.700	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	175.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	175.000.000	
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**1. Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan 2. Jumlah Layanan yang Pelayanan yang**	**1626 surat**	**1.627.479.300**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**1. Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan 2. Jumlah Layanan yang Pelayanan yang**	**1626 surat**	**1.627.479.300**	

		Terfasilitasi				**Terfasilitasi**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	74.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	74.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	454.460.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	454.460.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	150.006.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	150.006.900	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	124.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	124.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	240.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	240.000.000	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	560.012.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	560.012.400	
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Jumlah Penambahan Nilai Aset**	**10 Unit**	**661.251.092**	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah Penambahan Nilai Aset**	**10 Unit**	**661.251.092**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	241.721.092	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	241.721.092	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	239.880.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	239.880.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	179.650.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	179.650.000	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia,** **2. Jumlah Jasa Penunjang**	**5 kegiatan**	**3.593.580.400**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia,** **2. Jumlah Jasa Penunjang**	**5 kegiatan**	**3.593.580.400**	

		Perkantoran yang tersedia				**Perkantoran yang tersedia**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	50.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	799.950.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	799.950.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	100.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.643.630.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.643.630.400	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**1. Jumlah Objek Aset yang terkelola** **2. Total Nilai Aset**	**123 Unit**	**644.940.000**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**1. Jumlah Objek Aset yang terkelola** **2. Total Nilai Aset**	**123 Unit**	**644.940.000**	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	249.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	249.990.000	
Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	80.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	80.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	64.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	64.950.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	250.000.000	
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		**Jumlah Kepala Daerah yang difasilitasi administrasi keuangan dan Operasional nya**	**2 (KDH/WKDH)**	**865.500.000**	**ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**		**Jumlah Kepala Daerah yang difasilitasi administrasi keuangan dan Operasional nya**	**2 (KDH/WKDH)**	**865.500.000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pembayaran Gaji KDH/WKDH	2/14 Orang/Bulan	183.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pembayaran Gaji KDH/WKDH	2/14 Orang/Bulan	183.000.000	

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	52.500.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	52.500.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	30.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	30.000.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 Orang/Bulan	600.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2/12 Orang/Bulan	600.000.000	
	FASILITASI KERUMAHTANGAAN SEKRETARIAT DAERAH		**Jumlah paket fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah**	**2 (KDH/WKDH)**	**1.614.014.000**	**FASILITASI KERUMAHTANGAAN SEKRETARIAT DAERAH**		**Jumlah paket fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah**	**2 (KDH/WKDH)**	**1.614.014.000**	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	988.014.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	988.014.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	1 Paket	626.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	1 Paket	626.000.000	

	Daerah		Daerah yang Disediakan			Daerah		Daerah yang Disediakan			
	PENATAUSAHAAN ORGANISASI		**Jumlah dokumen penataan organisasi perangkat daerah**	**2 Dokumen**	**399.438.000**	**PENATAUSAHAAN ORGANISASI**		**Jumlah dokumen penataan organisasi perangkat daerah**	**2 Dokumen**	**399.438.000**	
			Jumlah OPD yang difasilitasi peningkatan pelayanan publik	**3 OPD**				**Jumlah OPD yang difasilitasi peningkatan pelayanan publik**	**3 OPD**		
			Jumlah Dokumen LKJIP yang tersusun	**1 Dokumen**				**Jumlah Dokumen LKJIP yang tersusun**	**1 Dokumen**		
			Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang tersusun	**1 Laporan**				**Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang tersusun**	**1 Laporan**		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	45 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	45 Dokumen	100.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17 Laporan	102.370.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17 Laporan	102.370.000	
	Peningkatan Kinerja dan		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan	1 Dokumen	102.068.000	Peningkatan Kinerja dan		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan	1 Dokumen	102.068.000	

Reformasi Birokrasi		Reformasi Birokrasi			Reformasi Birokrasi		Reformasi Birokrasi			
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	25.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	25.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	70.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	70.000.000	
PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		**Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang difasilitasi keprotokolannya**	**210 Kegiatan**	**594.990.000**	**PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**		**Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang difasilitasi keprotokolannya**	**210 Kegiatan**	**594.990.000**	
		jumlah kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan	**210 Kegiatan**				**jumlah kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan**	**210 Kegiatan**		
		Jumlah dokumentasi kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan	**1 Dokumen**				**Jumlah dokumentasi kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan**	**1 Dokumen**		
Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	350.000.000	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	350.000.000	
Fasilitasi Komunikasi		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	1 Laporan	145.000.000	Fasilitasi Komunikasi		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	1 Laporan	145.000.000	

	Pimpinan		Pimpinan			Pimpinan		Pimpinan			
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	99.990.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	99.990.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		***Persentase Ketersediaan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***	***100%***	***2.524.999.900***	***PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT***		***Persentase Ketersediaan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***	***100%***	***2.524.999.900***	
			Persentase MOU Kerjasama yang ditandatangani	***100%***				***Persentase MOU Kerjasama yang ditandatangani***	***100%***		
			Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial,	***2 kegiatan***				***Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial,***	***2 kegiatan***		
			Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah	***100%***				***Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah***	***100%***		
			Persentase Sengketa Hukum Daerah yang dimenangkan	***100%***				***Persentase Sengketa Hukum Daerah yang dimenangkan***	***100%***		

		Persentase produk hukum yang didokumentasikan dan diinformasikan secara elektronik	***100%***			***Persentase produk hukum yang didokumentasikan dan diinformasikan secara elektronik***	***100%***		
	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	**Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan yang laksanakan**	**1 Dokumen**	**185.000.000**	**ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN**	**Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan yang laksanakan**	**1 Dokumen**	**185.000.000**	
		Jumlah permasalahan kewilayahan yang terdokumentasi	**5 Permasalahan**			**Jumlah permasalahan kewilayahan yang terdokumentasi**	**5 Permasalahan**		
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	30.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	30.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	55.000.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	55.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	100.000.000	
	FASILITASI	**Jumlah kerjasama tingkat**	**16**	**50.000.000**	**FASILITASI**	**Jumlah kerjasama tingkat**	**16**	**50.000.000**	

	KERJASAMA DAERAH		**daerah yang terfasilitasi**	**Kerjasama**		**KERJASAMA DAERAH**		**daerah yang terfasilitasi**	**Kerjasama**		
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	50.000.000	
	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**Jumlah laporan laporan kegiatan bina mental spiritual yang terfasilitas**	**10 laporan**	**1.940.000.000**	**PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Jumlah laporan laporan kegiatan bina mental spiritual yang terfasilitas**	**10 laporan**	**1.940.000.000**	
			Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial,	**2 kegiatan**				**Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial,**	**2 kegiatan**		
			jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat	**2 Laporan**				**jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat**	**2 Laporan**		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	1.800.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	1.800.000.000	

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	70.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	70.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	70.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	70.000.000	

	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		**Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan, penyusunan dan implementasi produk hukum daerah**	**430 Laporan**	**349.999.900**	**FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**		**Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan, penyusunan dan implementasi produk hukum daerah**	**430 Laporan**	**349.999.900**	
			Jumlah kasus hukum pemda yang terbantu/terfasilitas	**10 Kasus**				**Jumlah kasus hukum pemda yang terbantu/terfasilitas**	**10 Kasus**		
			Jumlah produk hukum yang diinformasikan dan didokumentasikan	**430 Dokumen**				**Jumlah produk hukum yang diinformasikan dan didokumentasikan**	**430 Dokumen**		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	430 Dokumen	70.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	430 Dokumen	70.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	199.999.900	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	199.999.900	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	430 Dokumen	100.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	430 Dokumen	100.000.000	

	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		***Tingkat kepatuhan BLUD dan BUMD terhadap regulasi Good Corporate Governance (GCG)***	***100%***	***711.000.000***	***PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN***		***Tingkat kepatuhan BLUD dan BUMD terhadap regulasi Good Corporate Governance (GCG)***	***100%***	***711.000.000***	
			Persentase hasil koordinasi, fasilitasi dan monev bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	***100%***				***Persentase hasil koordinasi, fasilitasi dan monev bidang perekonomian yang ditindaklanjuti***	***100%***		
			Persentase Kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap KAK	***100%***				***Persentase Kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap KAK***	***100%***		
			Persentase Kegiatan dengan serapan anggaran diatas 75%,	***100%***				***Persentase Kegiatan dengan serapan anggaran diatas 75%,***	***100%***		
			persentase PD yang menyampaikan laporan realisasi kegiatan perangkat daerah tepat waktu.	***100%***				***persentase PD yang menyampaikan laporan realisasi kegiatan perangkat daerah tepat waktu.***	***100%***		
			Persentase PD yang mengumumkan RUP tepat waktu	***100%***				***Persentase PD yang mengumumkan RUP tepat waktu***	***100%***		

		Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui EProcurement terhadap APBD	***15%***			***Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui EProcurement terhadap APBD***	***15%***		
		Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu	***100%***			***Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu***	***100%***		
	PELAKSANAAN KEBIAJAKAN PEREKONOMIAN	**Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian**	**1 Laporan**	**145.000.000**	**PELAKSANAAN KEBIAJAKAN PEREKONOMIAN**	**Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian**	**1 Laporan**	**145.000.000**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	75.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	75.000.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	40.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	40.000.000	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan	5 Dokumen	30.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan	5 Dokumen	30.000.000	

		Ekonomi Mikro Kecil				Ekonomi Mikro Kecil		
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		**Jumlah laporan administrasi pembangunan daerah yang sesuai aturan**	**3 Laporan**	**150.000.000**	**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Jumlah laporan administrasi pembangunan daerah yang sesuai aturan**	**3 Laporan**	**150.000.000**
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	100.000.000
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	50.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	50.000.000
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	50.000.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	50.000.000
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		**Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi sesuai aturan**		**305.000.000**	**PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi sesuai aturan**		**305.000.000**
		Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan pembinaan pengadaan				**Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan pembinaan pengadaan**		

	barang dan jasa				**barang dan jasa**			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	110 Dokumen	195.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	110 Dokumen	195.000.000	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Dokumen	60.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Dokumen	60.000.000	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60 Orang	50.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60 Orang	50.000.000	
PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	**Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam**	**1 laporan**	**61.000.000**	**PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM**	**Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam**	**1 laporan**	**61.000.000**	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	26.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	26.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	15.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,	2 Dokumen	20.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,	2 Dokumen	20.000.000	

		Pertanahan				Pertanahan		

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Sekretariat Daerah Namun dalam proses ini Sekretariat Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

NO	KODE REKENING	BUKTI		URAIAN	JUMLAH	POTONGAN			KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL			PPh	PPN	LAINNYA	
1	2.2.02.1.1 . 5.1.5.05.03.0001	367/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an TPA Sandi Ulakan hibah uang	14.000.000	0,00	0,00	0,00	TU 3
2		368/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an MT Sandi Ulakan hibah uang	10.000.000	0,00	0,00	0,00	3726/SP2D-TU-SG.KES/NIHIL/BUD/2023
3		369/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an MT Annisa Pakandangan EL hibah uang	11.000.000	0,00	0,00	0,00	23/08/2023
4		370/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Bancah Lb Pandan 2x11 EL hibah	25.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
5		371/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Parit S Asam 2x11 EL hibah uang	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
6		372/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Tangah Sawah S Asam 2x11 EL	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				hibah uang					
7		373/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Anak Aia S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
8		374/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Tabiang S Asam 2x11 EL hibah uang	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
9		375/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Jambak S Asam 2x11 EL hibah uang	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
10		376/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Kapunduang S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
11		377/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Baru Tanjuang S Asam 2x11 EL	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				hibah uang					
12		378/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Tanjuang S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
13		379/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Gadang S Asam 2x11 EL hibah uang	5.000.000	0,00	0,00	0,00	

14		380/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Subarang Anak Aia S Asam 2x11 EL	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				hibah uang					
15		381/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Lubuak Uang S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
16		382/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Buah Kayu S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
17		383/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Masjid Al Istiqamah S Asam 2x11 EL hibah	10.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
18		384/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Aia Talago S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
19		385/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Dagang Hulu Labuah S Asam 2x11	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				EL hibah uang					
20		386/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Takangko S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
21		387/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Patamuan S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
22		388/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Talang S Asam 2x11 EL hibah uang	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
23		389/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Parang Kandang S Asam 2x11 EL	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				hibah uang					
24		390/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Tanjuang S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
25		391/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Baghu S Asam 2x11 EL hibah uang	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
26		392/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Kalikie S Asam 2x11 EL hibah uang	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
27		393/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Kabun S Asam 2x11 EL hibah uang	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
28		394/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Ulu Air S Asam 2x11 EL hibah uang	5.000.000	0,00	0,00	0,00	

29		395/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Aie Tajun S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
30		396/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Tanjung S Asam 2x11 EL hibah uang	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
31		397/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Cubadak S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
32		398/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Tabek S Asam 2x11 EL hibah uang	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
33		399/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Masjid Raya S Asam 2x11 EL hibah uang	10.000.000	0,00	0,00	0,00	
34		400/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Tanjung Baru S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
35		401/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Tanjung Lubuak Baru S Asam 2x11	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				EL hibah uang					
36		402/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Aie Tabik Sigauang S Asam 2x11 EL	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				hibah uang					
37		403/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Anak Air Sigauang S Asam 2x11 EL	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				hibah uang					
38		404/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Banda Kaciak Sigauang S Asam	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				2x11 EL hibah uang					
39		405/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Pulau Aie Korong Sigauang S Asam	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				2x11 EL hibah uang					
40		406/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Tampaik Sigauang S Asam 2x11 EL	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				hibah uang					
41		407/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Kalumpang S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					
42		408/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Kacang Sigauang S Asam 2x11 EL	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				hibah uang					

43		409/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Pauah Sigauang S Asam 2x11 EL	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				hibah uang					
44		410/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Buluah Kasok Sigauang S Asam	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				2x11 EL hibah uang					
45		411/TU3/Kesra/2023/SG-Kes	03/08/2023	Kesra an Surau Lubuak Baru S Asam 2x11 EL hibah	5.000.000	0,00	0,00	0,00	
				uang					**275.000.000**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Sekretariat Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

Tabel 3.1

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

No	Visi RPJMN Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		**Terwujudnya Sumatera barat madani yang Unggul dan Berkelanjutan**	**Padang Pariaman Berjaya**
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Beralkhlak Mulia, Sehat pengetahuan, terampil dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama berdasarkan Falsafah adat basandi syarak syarak basandi kitabullah serta memeliharan kerukunan ketentraman dan ketertiban
2.	Struktur Ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik secara Berkelanjutan dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas	Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Berbasiskan Peberdayaan Masyarakat

No	Visi RPJMN Tahun 2020-2024	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		**Terwujudnya Sumatera barat madani yang Unggul dan Berkelanjutan**	**Padang Pariaman Berjaya**
4	Mencapai Lingkugan Hidup yang Berkelanjutan	Eningkatkan usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Mengah serta Ekonomi Digital	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan Terampil serta Berdaya Saing Melalui Peninglatan Kualitas Pendidikan Formal dan Menggerakkan Sektor Pendidikan Non Formal
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan	Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratif Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan
6	Penegakkan Sistem Hukum yang Berbasis Korupsi, Bermartabat dan Terpecaya	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kearifan Lokal
7	Perlindungan bagi segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas	Meningkatkan sumber-sumber Pendanaan dan Ketepatan Alokasi Investasi melalui Penciptaan Illim yang Kondusif untuk Mengembangkan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya		
9	Sinergi Pemerintah daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.2

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	**Tema**	**Tema**
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosal kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	**Tema**	**Tema**
	kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial
		Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	**Tema**	**Tema**
	kemiskinan	Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama

Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

- Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Padag Pariaman Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan ajaran Agama
4. Meningkatnya kerukukan beragama
5. Meningkatnya pembangunan ekonomi

Dengan indikator Tujuan

1. Indeks pelayanan publik
2. Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB
3. Persentase Penggunaan Eprocurement terhadap Belanja Pengadaan
4. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)
5. Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah
6. indeks kerukunan beragama
7. PDRB/Income Per Kapita ADHB (Rp Juta)

A. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya
5. Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik	Persentase UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) yang bernilai baik	Persentase	100
2	**Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel**	1. Nilai SAKIP Pemerintah Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam	Persentase LHE SAKIP Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase	100

			Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			
		2. Persentase Penggunaan Eprocurement terhadap Belanja Pengadaan 3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencapai Target	Persentase	100
3	**meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama**	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Penyelenggaraan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1. persentase kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama dan berbudaya yg ditindaklanjuti	Persentase	100
4	**meningkatnya kerukukan beragama**	indeks kerukunan beragama		2. jumlah lembaga pendidikan alquran yg telah dibina	Nilai	5
5	**meningkatnya pembangunan ekonomi**	PDRB/Income Per Kapita ADHB (Rp Juta)	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam perumusan kebijakan daerah	1. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60
				2. Persentase bahan Kebijakan yang ditetapkan Sebagai Kebijakan Daerah	Persentase	100
			Meningkatnya peran Koordinasi dan Monitoring evaluasi dan perumusan kebujakan dalam peningkatakan pemanfaatan e-procurement	persentase kebijakan e procurement dalam pengadaan barang dan jasa yg di tindaklanjuti	Persentase	14

REVIU PERENCANA

Ketua Tim		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
30/6		30/6-25	

Paraf Verifikasi

Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

Tabel 3.2 (TC 33)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2					3	4	10	8	9	11	14	15	16
					SEKRETARIAT DAERAH				40.254.163.238,00				46.654.800.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				40.254.163.238,00				46.654.800.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				40.254.163.238,00				46.654.800.000,00

4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP Sekretariat Daerah yang ditindaklanjuti, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah, Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan dan Operasional Pimpinan sesuai Aturan, Persentase fasilitasi keprotokolan kegiatan daerah yang sesuai aturan, Persentase kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi, Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang dievaluasi, Persentase Peta Jabatan yang Disusun Tepat Waktu, Persentase UKPP yang difasilitasi,	Kab. Padang Pariaman, Sekretariat Daerah	100 % 100 % 84 % 80% 100% 100% 25% 100% 40% 100%	36.818.163.338,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik, Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	100 % 100 % 84 % 80% 100% 100% 25% 100% 40% 100%	40.786.300.000,00

						Persentase Ketersediaan Data Penyusunan LKJiP							

4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu, Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah		3 Dokumen 14 Laporan	206.862.740,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	88.000.000,00
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	156.222.250,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		55.000.000,00
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	50.640.490,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		33.000.000,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan		2 laporan	24.052.897.570,00		-	-	25.762.000.000,00
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225/14 Orang/bulan	23.584.896.770,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		25.300.000.000,00
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	387.960.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		418.000.000,00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410 Dokumen	40.040.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		22.000.000,00
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		22.000.000,00

4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		12 Laporan	17.995.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	30.000.000,00
4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	17.995.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		30.000.000,00

4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat 2. Jumlah ASN Terfasilitasi Kenaikan Gaji Berkala 3. Jumlah SKP ASN Semester dan Akhir Tahun 4. Jumlah ASN yang disediakan pakaian Dinas		63 orang	1.217.650.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	770.000.000,00
4	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	1.042.650.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		660.000.000,00
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 orang	175.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		110.000.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan 2. Jumlah Layanan yang Pelayanan yang Terfasilitasi		1626 surat	1.676.563.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	2.392.500.000,00
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	74.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		82.500.000,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	454.460.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		440.000.000,00
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	150.006.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		275.000.000,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		27.500.000,00
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								

						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	124.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		137.500.000,00
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	240.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		880.000.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	609.096.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		550.000.000,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset			1.948.330.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	3.289.000.000,00
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	1.528.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		2.750.000.000,00
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	239.880.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		440.000.000,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	179.650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		99.000.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia, 2. Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia		100 % 100 %	3.577.880.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	4.565.000.000,00
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		55.000.000,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	799.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		880.000.000,00
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		330.000.000,00
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	2.627.930.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		3.300.000.000,00

4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Objek Aset yang terkelola 2. Total Nilai Aset		123 Unit	644.940.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1.034.000.000,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Unit	249.990.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		605.000.000,00
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								

						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		33.000.000,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	64.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		66.000.000,00
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		330.000.000,00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan KDH/WKDH Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan KDH/WKDH Persentase Terpenuhinya medical Check Up KDH/WKDH Persentase Terpenuhinya medical Check Up KDH/WKDH		100 % 100 % 100 % 100 %	866.601.828,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	894.300.000,00
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2/14 Orang/Bulan	184.101.828,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		201.300.000,00
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	52.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		44.000.000,00
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								

						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		33.000.000,00
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2/12 Orang/Bulan	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		616.000.000,00

4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah		2 paket	1.614.014.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1.120.000.000,00
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah								
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	988.014.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		660.000.000,00
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								

						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	626.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		460.000.000,00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi perangkat daerah, Jumlah OPD yang difasilitasi peningkatan pelayanan publik, Jumlah Dokumen LKJIP yang tersusun, Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang tersusun,		2 Dokumen, 3 OPD, 1 Dokumen, 1 Laporan,	399.438.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	291.500.000,00
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								

						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		66.000.000,00
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	102.370.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		55.000.000,00
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi								

						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	102.068.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		55.000.000,00
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		27.500.000,00
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah								

						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		88.000.000,00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang difasilitasi keprotokolannya, jumlah kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan Jumlah dokumentasi kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan		210 Kegiatan, 210 Kegiatan, 1 Dokumen	594.990.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	550.000.000,00
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan								

						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	350.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		220.000.000,00
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	145.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		165.000.000,00
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								

						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	99.990.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		165.000.000,00

4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Persentase MOU Kerjasama yang ditandatangani, Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial, Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah , Persentase Sengketa Hukum Daerah yang dimenangkan Persentase produk hukum yang didokumentasikan dan diinformasikan secara elektronik,		100% 100% 2 Kegiatan 100% 100% 100%	2.724.999.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA PERUNTUKAN BIDANG KESEHATAN		-	5.148.000.000,00

4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan yang laksanakan, Jumlah permasalahan kewilayahan yang terdokumentasi		1 Dokumen 5 Permasalahan	185.000.000,00		-	-	143.000.000,00
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		33.000.000,00
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	55.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		33.000.000,00
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		77.000.000,00

4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan laporan kegiatan bina mental spiritual yang terfasilitas, Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial, jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat		10 laporan, 2 kegiatan, 2 Laporan,	2.140.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA PERUNTUKAN BIDANG KESEHATAN	-	-	4.554.000.000,00
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	2.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA PERUNTUKAN BIDANG KESEHATAN	-		4.400.000.000,00

4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial							
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		77.000.000,00
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat							

						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		77.000.000,00
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan, penyusunan dan implementasi produk hukum daerah, Jumlah kasus hukum pemda yang terbantu/terfasilitas, Jumlah produk hukum yang diinformasikan dan didokumentasikan		435 Laporan, 10 Kasus, 435 Dokumen	349.999.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	396.000.000,00
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								

						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430 Dokumen	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		55.000.000,00
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum								
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kasus	199.999.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		275.000.000,00
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								

						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430 Dokumen	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		66.000.000,00
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama tingkat daerah yang terfasilitasi		16 Kerjasama	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	55.000.000,00
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								

						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		55.000.000,00

4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kepatuhan BLUD dan BUMD terhadap regulasi Good Corporate Governance (GCG), Persentase hasil koordinasi, fasilitasi dan monev bidang perekonomian yang ditindaklanjuti, Persentase Kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap KAK , Persentase Kegiatan dengan serapan anggaran diatas 75%, , persentase PD yang menyampaikan laporan realisasi kegiatan perangkat daerah tepat waktu, Persentase PD yang mengumumkan RUP tepat waktu , Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui EProcurement terhadap APBD, Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu ,		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 15 % 100 %	711.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	720.500.000,00

4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian		1 Laporan	145.000.000,00		-	-	143.000.000,00
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		55.000.000,00
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		55.000.000,00
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								

						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		33.000.000,00
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan administrasi pembangunan daerah yang sesuai aturan		3 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	159.500.000,00
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								

						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		55.000.000,00
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		49.500.000,00
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								

						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		55.000.000,00
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi sesuai aturan, Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa			305.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	352.000.000,00
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110 Dokumen	195.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		220.000.000,00
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		66.000.000,00
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		66.000.000,00
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam		1 Laporan	61.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	66.000.000,00
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		22.000.000,00

4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	15.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		22.000.000,00
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		22.000.000,00
								J U M L A H	**40.254.163.238,00**			**46.654.800.000,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						40.254.163.238,00							46.654.800.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						40.254.163.238,00							46.654.800.000,00	
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH						40.254.163.238,00							46.654.800.000,00	

1	4	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP Sekretariat Daerah yang ditindaklanjuti, Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah, Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan dan Operasional Pimpinan sesuai Aturan, Persentase fasilitasi keprotokolan kegiatan daerah yang sesuai aturan, Persentase kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi, Persentase	100 % 100 % 84 % 80% 100% 100% 25% 100% 40% 100%			100 % 100 % 84 % 80% 100% 100% 25% 100% 40% 100%	36.818.163.338,00	Kab. Padang Pariaman, Sekretariat Daerah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Pelayanan Publik, Meningkatnya peran koordinasi dan monitoring evaluasi dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	100 % 100 % 84 % 80% 100 % 100 % 25% 100 % 40% 100 %	40.786.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

							Kelembagaan Perangkat Daerah yang dievaluasi, Persentase Peta Jabatan yang Disusun Tepat Waktu, Persentase UKPP yang difasilitasi, Persentase Ketersediaan Data Penyusunan LKJiP													

	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu, Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen 14 Laporan			3 Dokumen 14 Laporan	206.862.740,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	88.000.000,00	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	156.222.250,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			2 Laporan	50.640.490,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	2 laporan			2 laporan	24.052.897.570,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	25.762.000.000,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225/14 Orang/bulan			225/14 Orang/bulan	23.584.896.770,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		25.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			12 Dokumen	387.960.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		418.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	410 Dokumen			410 Dokumen	40.040.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	12 Laporan			12 Laporan	17.995.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	30.000.000,00	
	4	01	01	2.03	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	17.995.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat 2. Jumlah ASN Terfasilitasi Kenaikan Gaji Berkala 3. Jumlah SKP ASN Semester dan Akhir Tahun 4. Jumlah ASN yang disediakan pakaian Dinas	63 orang			63 orang	1.217.650.700,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	770.000.000,00	
	4	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen			4 Dokumen	1.042.650.700,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang			60 orang	175.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan 2. Jumlah Layanan yang Pelayanan yang Terfasilitasi	1626 surat			1626 surat	1.676.563.100,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	2.392.500.000,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	74.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		82.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	00002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	454.460.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	150.006.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	00 07	Penyediaan Bahan/Material														

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	124.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		137.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	240.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		880.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	609.096.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	-				1.948.330.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	3.289.000.000,00	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	1.528.800.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel													

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	239.880.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	179.650.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		99.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia, 2. Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia	-			100 % 100 %	3.577.880.400,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	4.565.000.000,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	799.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		880.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	2.627.930.400,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Objek Aset yang terkelola 2. Total Nilai Aset	-			123 Unit	644.940.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial	-	-	1.034.000.000,00	

	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				37 Unit	249.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahan	-		605.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																an Sosial				
	4	01	01	2.09	00 05	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	80.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	64.950.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	250.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan KDH/WKDH Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan KDH/WKDH Persentase Terpenuhinya medical Check Up KDH/WKDH Persentase Terpenuhinya medical Check Up	-			100 % 100 % 100 % 100 %	866.601.828,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan	-	-	894.300.000,00	

							KDH/WKDH									Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/14 Orang/Bulan	184.101.828,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		201.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	52.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/12 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		616.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	-			2 paket	1.614.014.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan	-	-	1.120.000.000,00	

															Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	988.014.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	626.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi perangkat daerah, Jumlah OPD yang difasilitasi peningkatan pelayanan publik, Jumlah Dokumen LKJIP yang tersusun, Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang tersusun,	-			2 Dokumen, 3 OPD, 1 Dokumen, 1 Laporan,	399.438.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan	-	-	291.500.000,00	

																Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				45 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				17 Laporan	102.370.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	102.068.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		88.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang difasilitasi keprotokolannya, jumlah kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan Jumlah dokumentasi kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan	-			210 Kegiatan, 210 Kegiatan, 1 Dokumen	594.990.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan	-	-	550.000.000,00	

																Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	145.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	99.990.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				

2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Persentase MOU Kerjasama yang ditandatangani, Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial, Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah , Persentase Sengketa Hukum Daerah yang dimenangkan Persentase produk hukum yang didokumentasikan dan diinformasikan secara	100% 100% 2 Kegiatan 100% 100% 100%			100% 100% 2 Kegiatan 100% 100% 100%	2.724.999.900,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA PERUNTUKAN BIDANG KESEHATAN				-	5.148.000.000,00	

							elektronik,												

	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan yang laksanakan, Jumlah permasalahan kewilayahan yang terdokumentasi	-			1 Dokumen 5 Permasalahan	185.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	143.000.000,00	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan													

							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	00 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan laporan kegiatan bina mental spiritual yang terfasilitas, Jumlah kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial, jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat	10 laporan, 2 kegiatan, 2 Laporan,			10 laporan, 2 kegiatan, 2 Laporan,	2.140.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA PERUNTUKAN BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi	-	-	4.554.000.000,00	

																kitabullah"				
	4	0 1	0 2	2.0 2	00 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen			10 Dokumen	2.000.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA PERUNTUKAN BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi	-		4.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																kitabullah"				
	4	0 1	0 2	2.0 2	00 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen			2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi	-		77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																kitabullah"			
	4	0 1	0 2	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													

							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi	-		77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																kitabullah"			
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan, penyusunan dan implementasi produk hukum daerah, Jumlah kasus hukum pemda yang terbantu/terfasilitas, Jumlah produk hukum yang diinformasikan dan didokumentasikan	-			435 Laporan, 10 Kasus, 435 Dokumen	349.999.900,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkata	-	-	396.000.000,00	

																n Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				430 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	199.999.900,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	02	2.03	00 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				430 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama tingkat daerah yang terfasilitasi	-			16 Kerjasama	50.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan	-	-	55.000.000,00	

																Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5.	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				

3	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kepatuhan BLUD dan BUMD terhadap regulasi Good Corporate Governance (GCG), Persentase hasil koordinasi, fasilitasi dan monev bidang perekonomian yang ditindaklanjuti, Persentase Kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap KAK , Persentase Kegiatan dengan serapan anggaran diatas 75%, , persentase PD yang menyampaikan laporan realisasi kegiatan perangkat daerah tepat waktu, Persentase PD yang mengumumkan RUP tepat waktu , Persentase efisiensi belanja barang dan jasa	-			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 15 % 100 %	711.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				-	720.500.000,00	

							melalui EProcurement terhadap APBD, Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu ,												

	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian	-			1 Laporan	145.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	143.000.000,00	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				3 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

													Semua Kel/Desa			3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan			
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				6 Laporan	40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Berkeadilan				
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				5 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan administrasi pembangunan daerah yang sesuai aturan	-			3 Laporan	200.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	159.500.000,00	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														

							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		49.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													

							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi sesuai aturan, Jumlah laporan pelaksanaan advokasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa	-				305.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	352.000.000,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				110 Dokumen	195.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													

							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				60 Orang	50.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	-			1 Laporan	61.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya	-	-	66.000.000,00	

						Alam	Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam							ALOKASI UMUM		saing kepariwisataan				
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				4 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

							Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan						Semua Kel/Desa			3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan				
	J U M L A H										**40.254.163.238,00**							**46.654.800.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Sekretariat Daerah ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Sekretariat Daerah diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Sekretariat Daerah perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang

perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Sekretariat Daerah menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Sekretariat Daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Parit Malintang, 04 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP.MM.C.R.B.C
Pembina Utama Madya
NIP. 19790402 199803 1 003